

**RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG
WILAYAH DAN TATA RUANG**

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Data dan Informasi Spasial

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
I	Peningkatan koordinasi kegiatan survei dan pemetaan nasional	Tersusunnya kerangka peraturan perundang-undangan tentang kegiatan survei dan pemetaan	Jumlah kerangka peraturan perundang-undangan tentang kegiatan survei dan pemetaan	1 UU	1 UU, 4 PP, 2 Perpres, 3 Kep KA-BAKOSURTANAL, 2 dokumen reformasi birokrasi ^{KJ}			67,22
		Tersusunnya Standar, Prosedur, dan Manual bidang survei dan pemetaan nasional	Jumlah dokumen Standar, Prosedur, dan Manual bidang survei dan pemetaan nasional	12 SNI	60 SNI ^{KJ}			

BIDANG PEMBANGUNAN

: WILAYAH DAN TATA RUANG

PRIORITAS BIDANG

: Pembangunan Data dan Informasi Spasial

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
a	Pembangunan Infrastruktur Data Spasial	Rancangan rumusan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pembangunan Infrastruktur Data Spasial	Jumlah dokumen SNI	12	60 ^{k)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	13,5
			Jumlah peraturan per-UU-an dan jumlah dokumen penyelenggaraan reformasi birokrasi	1 UU	1 UU, 4 PP, 2 Perpres, 3 Kep KA-BAKOSURTANAL, 2 dokumen reformasi birokrasi	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	10,9
b	Pemetaan Dasar Rupabumi dan Tata Ruang	Kebijakan pemetaan dasar rupabumi dan meningkatnya jumlah cakupan peta rupabumi Indonesia	Jumlah Dokumen Norma Spesifikasi Pedoman Kriteria (NSPK)	5	25 ^{k)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	7,0
			Jumlah dokumen pelaksanaan Koordinasi penyelenggaraan Pemetaan Dasar Rupabumi dan Tata Ruang	5	25 ^{k)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	13,5
c	Pemetaan Dasar Kelautan dan Kedirgantaraan	Kebijakan pemetaan dasar kelautan dan kedirgantaraan serta meningkatnya cakupan peta dasar kelautan dan kedirgantaraan	Kualitas kerjasama, sinergi, koordinasi, program dan kegiatan, serta diseminasi data spasial kelautan dan kedirgantaraan nasional	2	10 ^{k)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	2,6
d	Peningkatan Ketersediaan Data dan Informasi Survei Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Matra Darat	Tersedianya data dan informasi spasial SDA dan LH tematik matra darat	Jumlah dokumen rumusan kebijakan dan NSPK survei dan pemetaan SDA dan LH tematik matra darat	1	5 ^{k)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	6,3
e	Peningkatan Ketersediaan Data dan Informasi Survei Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Matra Laut	Tersedianya data dan informasi spasial SDA dan LH tematik matra laut	Jumlah dokumen rumusan kebijakan dan NSPK survei SDA dan LH tematik matra laut	1	5 ^{k)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	6,6

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Data dan Informasi Spasial

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
f	Penyusunan Atlas Sumberdaya dan Kajian Pengembangan Wilayah.	Tersedianya data dan informasi atlas serta pengembangan wilayah	Jumlah dokumen rumusan kebijakan dan NSPK atlas serta kajian pengembangan wilayah	0	4 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	5,6
g	Pembangunan Data dan Informasi Geodesi dan Geodinamika	Rancangan rumusan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pembangunan data dan informasi geodesi dan geodinamika	Jumlah dokumen kebijakan teknis di bidang data dan informasi geodesi dan geodinamika	1	5 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	1,2
II	Peningkatan kuantitas dan kualitas data dan informasi spasial	Tersedianya peta dasar dan peta tematik untuk perencanaan wilayah dan sektoral	Jumlah kerangka dasar dan data dasar nasional	97 NLP	487 NLP ^{K)}			1032,6
			Jumlah peta dasar nasional	312 NLP	2632 NLP ^{K)}			
			Jumlah peta tematik nasional	200 NLP	1242 NLP ^{K)}			
a	Pemetaan Batas Wilayah	Kebijakan pemetaan batas wilayah dan meningkatnya cakupan peta batas wilayah	Jumlah NLP Peta batas wilayah negara (joint Mapping) koridor perbatasan darat RI-PNG, RI-Malaysia skala 1:50.000	0	44 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	4,4
			Jumlah NLP pemetaan kecamatan kawasan perbatasan darat RI-PNG, RI-Malaysia, dan RI-RDTL skala 1:50.000 serta skala 1:25.000	72	161 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	13,1
			Jumlah pulau pemetaan pulau-pulau terluar	25	58 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	2,4
			Jumlah daerah penataan batas provinsi/kab/kota	0	36 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	4,3

BIDANG PEMBANGUNAN

: WILAYAH DAN TATA RUANG

PRIORITAS BIDANG

: Pembangunan Data dan Informasi Spasial

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			Jumlah wilayah dalam pemetaan wilayah provinsi	0	33 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	4,5
			Jumlah wilayah dalam pemetaan wilayah kabupaten	40	397 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	7,4
			Jumlah wilayah dalam pemetaan wilayah kota	0	98 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	4,5
			Jumlah (Border Sign Post) BSP RI-RDTL	0	240 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	2,6
			Jumlah Perapatan pilar batas RI-Malaysia	22	110 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	12,1
			Jumlah Perapatan pilar batas RI-PNG	0	20 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	4,9
			Jumlah Perapatan pilar batas RI-RDTL	60	300 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	6,1
			Jumlah dokumen perundingan teknis batas darat	3	15 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	6,3
			Jumlah dokumen perundingan teknis batas maritim	3	17 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	6,0
			Jumlah dokumen kajian LKI>200 NM	1	6 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	3,6

BIDANG PEMBANGUNAN

: WILAYAH DAN TATA RUANG

PRIORITAS BIDANG

: Pembangunan Data dan Informasi Spasial

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			Jumlah dokumen pengkajian dan Pemetaan batas negara dan geopolitik	1	5 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	4,0
			Jumlah NLP penyusunan dan pemeliharaan basisdata batas wilayah	110	1130 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	3,4
b	Pemetaan Dasar Rupabumi dan Tata Ruang	Kebijakan pemetaan dasar rupabumi dan meningkatnya jumlah cakupan peta rupabumi Indonesia	Jumlah Nomor Lembar Peta (NLP) Peta Rupabumi skala 1:10.000 (Sumatera & selatan Jawa)	90	724 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	32,0
			Jumlah NLP Peta Rupabumi skala 1:50.000 wilayah gap	160	1490 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	411,5
			Jumlah NLP Peta Rupabumi skala 1:250.000 wilayah gap	0	60 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	48,0
			Jumlah NLP gasetir dan model penataan ruang provinsi	400	2000 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	9,5
			Jumlah NLP Basis Data Geospasial skala 1:10.000 (Sumatera & selatan Jawa), 1:50.000, dan 1:250.000	250	2274 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	11,0

BIDANG PEMBANGUNAN

: WILAYAH DAN TATA RUANG

PRIORITAS BIDANG

: Pembangunan Data dan Informasi Spasial

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
c	Pemetaan Dasar Kelautan dan Kedirgantaraan	Kebijakan pemetaan dasar kelautan dan kedirgantaraan serta meningkatnya cakupan peta dasar kelautan dan kedirgantaraan	Survei batimetri lepas pantai line km	13680	68400 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	21,5
			Jumlah liputan data spasial batimetri, Pantai (LPI) dalam ln km	34000	265000 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	34,6
			Percepatan Survei Hidrografi pantai multibeam line km	30000	225000 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	16,1
			Jumlah NLP Peta LPI skala 1:25K, 1:50K, 1:250K dan LLN 1:500K	52	292 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	11,1
			Pembuatan Peta LBI	2	15 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	3,3
			Pembuatan peta navigasi udara (Aeronautical Chart)	8	51 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	5,7
			Peta Resmi tingkat peringatan tsunami	2	16 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	1,9
			Jumlah liputan peta dasar kelautan dan kedirgantaraan dan basis data kelautan dan kedirgantaraan	1	5 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	12,1
			Pemutakhiran peta dasar kelautan dan kedirgantaraan serta basis data kelautan dan kedirgantaraan	4	41 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	0,9
d	Peningkatan Ketersediaan Data dan Informasi Survei Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Matra Laut	Tersedianya data dan informasi spasial SDA dan LH tematik matra laut	Jumlah produk inventarisasi, neraca, kajian aplikasi tekno surta, remote sensing/GIS, dinamika geografis SDA dan kajian wilayah LH matra laut yang diatur dan dikelola sebagai basis data pemetaan nasional	18 NLP(@5 tema) dan 4 dok	90 NLP(@5 tema) dan 20 dok ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	46,5

BIDANG PEMBANGUNAN

: WILAYAH DAN TATA RUANG

PRIORITAS BIDANG

: Pembangunan Data dan Informasi Spasial

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
e	Peningkatan Ketersediaan Data dan Informasi Survei Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Matra Darat	Tersedianya data dan informasi spasial SDA dan LH tematik matra darat	Jumlah NLP produk inventarisasi, neraca, kebencanaan, kajian aplikasi tekno surta, remote sensing, dinamika geografis dan kajian wilayah, SDA dan LH matra darat yang diatur dan dikelola sebagai basis data pemetaan nasional.	25	225 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	31,9
f	Pembangunan Data dan Informasi Geodesi dan Geodinamika	Rancangan rumusan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pembangunan data dan informasi geodesi dan geodinamika	Jumlah stasiun tetap GPS dan perawatan sistem	78	458 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	40,5
			Jumlah Pembangunan stasiun tetap GPS	12	22 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	7,0
			Jumlah pembangunan stasiun pasang surut laut	7	7 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	3,5
			Jumlah jaring kontrol geodesi dan geodinamika yang dirawat	150	950 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	15,1
			Jumlah stasiun pasang surut laut yang dirawat	88	468 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	16,6
			Jumlah stasiun permanen gayaberat yang dirawat	0	4 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	0,4
			Jumlah basis data geodesi dan geodinamika	1	5 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	0,7

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Data dan Informasi Spasial

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
g	Penyusunan Atlas Sumberdaya dan Kajian Pengembangan Wilayah	Tersedianya data dan informasi atlas serta pengembangan wilayah	Jumlah dokumen kajian model spasial dinamis serta difusi, diseminasi atlas dan kajian pengembangan wilayah	2	6 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	93,3
			Jumlah daerah (propinsi dan kabupaten) untuk pelaksanaan akses, utilitas data dan informasi atlas sumberdaya dan kajian pengembangan wilayah	14	70 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	14,5
			Jumlah dokumen produk atlas sumberdaya beserta basisdatanya	18	84 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	40,4
h	Pembangunan Infrastruktur Data Spasial	Rancangan rumusan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pembangunan Infrastruktur Data Spasial	Jumlah metadata simpul jaringan pusat	3	13 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	3,5
			Jumlah metadata simpul jaringan provinsi	3	15 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	3,5
			Jumlah metadata simpul jaringan kabupaten/kota	4	19 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	6,4
III	Peningkatan akses data dan informasi	Terbangunnya jaringan JDSN di seluruh instansi pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah kab/kota, serta universitas negeri	Cakupan jaringan JDSN di instansi pemerintah pusat (14 simpul), pemerintah propinsi (28 simpul), pemerintah kab/kota (480 simpul) menjadi 100%	70 simpul	522 simpul ^{K)}			908,2
			Laporan hasil evaluasi berkala atas standar teknis dan klasifikasi data informasi spasial (setiap 3 atau 5 tahun)	0	1 ^{K)}			

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Data dan Informasi Spasial

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
a	Peningkatan Ketersediaan Data dan Informasi Survei Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Matra Laut	Tersedianya data dan informasi spasial SDA dan LH tematik matra laut	Jumlah akses, diseminasi dan utilitas informasi data spasial tematik SDA dan LH matra laut	33 Prov, 6 K/L	33 Prov, 6 K/L	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	13,3
b	Peningkatan Ketersediaan Data Dan Informasi Survei Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Matra Darat	Tersedianya data dan informasi spasial SDA dan LH tematik matra darat	Jumlah akses, diseminasi dan utilitas informasi data spasial tematik SDA dan LH matra darat	33 Prov, 6 K/L	33 Prov, 6 K/L	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	12,8
			Jumlah dokumen database SDA darat	1	5 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	12,8
c	Pembangunan Infrastruktur Data Spasial	Rancangan rumusan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pembangunan Infrastruktur Data Spasial	Jumlah simpul jaringan di pusat	14	14 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	0,8
			Jumlah simpul jaringan di provinsi	6	28 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	4,8
			Jumlah simpul jaringan di kabupaten/kota	50	480 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	16,4
			Jumlah pembangunan dan pengembangan penghubung simpul	1	5 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	36,1
			Jumlah dokumen pembangunan dan pengembangan IDSN	1	5 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	795,3
			Jumlah dokumen kegiatan promosi, humas, administrasi kerjasama dan publikasi surta	4	20 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	15,9
IV	Peningkatan SDM di bidang survei dan pemetaan	Tersedianya sumber daya manusia yang cukup baik dari sisi kuantitas dan kualitas untuk mendukung kegiatan survei dan pemetaan nasional	Jumlah tenaga terampil (bersertifikat) di bidang survei dan pemetaan	210	1590 ^{K)}			41,0
			Penyusunan kurikulum dan silabus nasional bagi pelatihan dan sertifikasi tenaga terampil survei dan pemetaan	5	34 ^{K)}			

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Data dan Informasi Spasial

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
			Dokumen Strategi Nasional bagi pengembangan dan pengelolaan sumberdaya manusia bidang survei dan pemetaan	0	2 ^{K)}			
a	Pembangunan Infrastruktur Data Spasial	Rancangan rumusan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pembangunan Infrastruktur Data Spasial	Jumlah tenaga terampil melalui Diklat Teknis Surta	70	430 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	2,9
			Jumlah tenaga terampil melalui Diklat Fungsional Surveior Pemetaan	140	1160 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	4,6
			Jumlah Dokumen NSPK tentang Pedoman, Standardisasi Kurikulum dan Silabus Diklat Surta	5	34 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	1,8
			Jumlah kegiatan peningkatan Kapabilitas Personil, Infrastruktur dan Administrasi Kediklatan	5	30 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	6,7
			Jumlah rasio jumlah penelitian per peneliti	1:03	1:02	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	15,9
			Jumlah dokumen penegakan Sertifikasi SDM surta non-PNS dan fungsionalisasi SDM surta PNS	0	2 ^{K)}	Survei dan Pemetaan Nasional	BAKOSURTANAL	9,1
TOTAL								2,049,0

Keterangan :

^{K)} Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Penataan Ruang

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
I	Penyelesaian Peraturan Perundangan sesuai amanat Undang-Undang Penataan Ruang	Tersedianya aturan perundangan sesuai Amanat UU 26/2007	Menurunnya (Jumlah) konflik pemanfaatan ruang					331,74
a	Penyiapan dan Penetapan Materi Peraturan Perundangan-undangan dan NSPK Bidang	Tersusunnya PP Sesuai Amanat UU 26/2007, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> · PP tentang Penyelenggaraan Pembinaan Penataan Ruang · PP tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (termasuk di dalamnya adalah PP tentang Kriteria dan Tata Cara Peninjauan Kembali RTRW · PP tentang Zonasi Sistem Nasional · PP tentang Prosedur Perolehan Izin Pemanfaatan Ruang Dan Tata Cara Penggantian Yang Layak · PP tentang Insentif dan Disinsentif · PP tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang · PP tentang Kriteria Kawasan Perkotaan 	Meningkatnya (Presentase) Penyelesaian PP Sesuai Amanat UU 26/2007	8 NSPK	60 NSPK ^{K)}	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kementerian PU	96,0

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Penataan Ruang

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
		<ul style="list-style-type: none"> · PP tentang Penataan Kawasan Perkotaan · PP tentang Penataan Kawasan Agropolitan · PP tentang Penataan Ruang Kawasan Perdesaan · PP tentang Sanksi Administratif 						
b	Peningkatan dan Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah	Tersusunnya PP Sesuai Amanat UU 26/2007	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah PP tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat. Jumlah Penyusunan NSPM Penataan Ruang Daerah. 	1 PP	1 PP ^{ki)}	Program Bina Pembangunan Daerah	Kemendagri	5,6
c	Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional Termasuk Melakukan Koordinasi dan Fasilitasi Proses Penetapan Dokumen-dokumen yang Dihasilkan	Tersusunnya Perpres Sesuai Amanat UU 26/2007: <ul style="list-style-type: none"> · Perpres RTR Pulau · Perpres RTR KSN 	Meningkatnya Penyelesaian Perpres sesuai Amanat UU 26/2007	4 RTR Pulau dan 4 Perpres KSN	7 RTR Pulau dan 69 Perpres KSN ^{ki)}	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kementerian PU	204,5
d	Fasilitasi Penyusunan Substansi Raperda RTRW dan Rencana Rincinya	Tersusunnya Perda Sesuai Amanat UU 26/2007: <ul style="list-style-type: none"> · Perda mengenai RTRW Provinsi · Perda mengenai RTRW Kabupaten 	Meningkatnya Penyelesaian Perda Provinsi dan Kabupaten Amanat UU 26/2007	4 keg	11 kegiatan ^{ki)}	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kementerian PU	11,4

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Penataan Ruang

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
e	Peningkatan dan Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah	Tersusunnya Perda Sesuai Amanat UU 26/2007 dan Undang-Undang 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya (Persentase) Penyelesaian Perda Sesuai Amanat UU 26/2007 dan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.	30% daerah	100%	Program Bina Pembangunan Daerah	Kemendagri	14,3
		Bantuan Penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah Pemekaran.	Jumlah RTR Daerah Pemekaran yang sudah disempurnakan.	2 daerah	14 daerah ^{*)}			
II	Peningkatan Kualitas Produk Rencana Tata Ruang	Meningkatnya kualitas produk rencana tata ruang	Menurunnya (Jumlah) konflik pemanfaatan ruang					327,8
a	Pemetaan Dasar Rupabumi dan Tata Ruang	Tersusunnya kebijakan pemetaan dasar rupabumi dan meningkatnya jumlah cakupan peta rupabumi Indonesia	Jumlah Nomor Lembar Peta (NLP) Peta Rupabumi skala 1:10.000 (Sumatera & selatan Jawa)	90		Program Survei dan Pemetaan Nasional	Bakosurtanal	
		Jumlah NLP Peta Rupabumi skala 1:50.000 wilayah gap	160					
		Jumlah NLP Peta upabumi skala 1:250.000 wilayah gap	-					
		Jumlah NLP Bsis Data Geospasial skala :10.000 (Sumatera & selatan Jawa),1:50.000 dan 1:250.000	250					
		Jumlah Dokumen Norma Spesifikasi Pedoman Kriteria (NSPK)	5					
		Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Pemetaan Dasar Rupabumi dan Tata Ruang	5					
		Jumlah NLP gasetir dan model penataan ruang provinsi	400					

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Penataan Ruang

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
b	Peningkatan kualitas hasil penyelenggaraan penataan ruang	Terlaksananya bantek dan bintek penataan ruang di pusat dan daerah	Jumlah kegiatan stock taking tata ruang provinsi	0	18 kegiatan ^{k)}	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kementerian PU	15,0
			Jumlah kabupaten yang mendapatkan bantek peningkatan pelaksanaan penataan ruang kabupaten pemenang PKPD	3 kab	15 kab ^{k)}			18,8
			Jumlah kabupaten yang mendapatkan bimbingan teknis penataan ruang wilayah kabupaten	44 kab	220 kab ^{k)}			103,2
			Jumlah kabupaten yang mendapatkan bimbingan teknis pengembangan wilayah/kawasan perdesaan dan agropolitan	1 kawasan	28 kawasan ^{k)}			24,3
			Jumlah kegiatan bimbingan teknis pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi	6 keg	22 keg ^{k)}			21,9
			Jumlah kawasan andalan/koridor yang mendapatkan arahan pengembangan wilayah lintas provinsi	1 kawasan	15 kawasan ^{k)}			15,0
			Jumlah wilayah sungai yang mendapatkan fasilitasi penataan ruang lintas wilayah	6 ws	69 ws ^{k)}			85,7
			c	Pengembangan Kapasitas dan Pelembagaan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya SDM Penataan ruang yang berkualitas			Jumlah kegiatan pelatihan bidang penataan ruang yang dilaksanakan

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Penataan Ruang

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
III	Sinkronisasi program pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang	Sinkronnya rencana tata ruang dengan rencana pembangunan dan antar rencana tata ruang	Jumlah rencana tata ruang yang sinkron dan jumlah konflik yang terselesaikan					745,1
a	Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional termasuk Melakukan Koordinasi dan Fasilitasi Proses Penetapan Dokumen-dokumen yang dihasilkan	Keserasian dan keselarasan program pembangunan yaitu program dalam RTRWN, RTR Pulau, RTR KSN, RTR PKN, PKSN	Jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan program pembangunannya	33 provinsi	33 provinsi	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kementerian PU	720,2
b	Perumusan sinkronisasi UU Penataan Ruang dan UU sektoral terkait	Keserasian dan keselarasan antar UU	Jumlah kegiatan sinkronisasi UU	2 kegiatan	4 kegiatan ^{k)}	Program Koordinasi Pengembangan Urusan Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah	Menko Perekonomian	4,0
c	Peningkatan dan Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah	Meningkatnya keterpaduan dalam penataan ruang Meningkatnya Pemahaman Aparat Daerah dalam Penataan Ruang. Monitoring dan Evaluasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang di Daerah.	Jumlah BKPRD yang terbentuk. Terselenggaranya Rakernas BKPRN. Terselenggaranya Raker BKPRD. Terselenggaranya Peningkatan SDM dalam Penataan Ruang (Pemda, BKPRD dan DPRD). Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Penataan Ruang. Jumlah kegiatan evaluasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang.	30% daerah - 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	90% 2 kegiatan ^{k)} 6 kegiatan ^{k)} 5 kegiatan ^{k)} 5 ^{k)} 5 ^{k)}	Program Bina Pembangunan Daerah	Kemendagri	21,0
IV	Peningkatan kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas program pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan lahan					78,5

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Penataan Ruang

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014			
a	Kegiatan penyusunan rencana pembangunan kewilayahan (pembangunan daerah berdasarkan kewilayahan/lintas wilayah) di bidang tata ruang dan pertanahan	Tersusunnya kebijakan insentif PR: <ul style="list-style-type: none"> • Pajak • Kompensasi • Subsidi silang • Imbalan • Sewa ruang • Urun saham Tersusunnya program disinsentif PR: <ul style="list-style-type: none"> • Pajak • Infrastruktur • Kompensasi • Penalti 	Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan insentif dan disinsentif pelaksanaan penataan ruang di daerah	1 laporan	5 laporan ^{K)}	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	Bappenas	4,0
b	Pembinaan PPNS bidang Penataan Ruang	Terbinanya PPNS bidang penataan ruang	Jumlah (orang) PPNS yang dibina	90 orang	500 orang ^{K)}	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kementerian PU	32,5
c	Perumusan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri serta Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan	Laporan kinerja penyelenggaraan penataan ruang di pusat dan daerah	Jumlah kegiatan evaluasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang	7 kegiatan	40 kegiatan ^{K)}	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kementerian PU	42,0
TOTAL								1.483,2

Keterangan :

^{K)} Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Reforma Agraria

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014*			
I	Fokus 1: Peningkatan Jaminan Kepastian Hukum Hak Masyarakat Atas Tanah	Meningkatnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah	Luas tanah yang memiliki kepastian hukum hak atas tanah					2.816,1
a	Pengelolaan Pertanahan Provinsi	Terwujudnya pengembangan infrastruktur pertanahan secara nasional, regional dan sektoral, yang diperlukan di seluruh Indonesia	Cakupan peta pertanahan (Prioritas Nasional 7)	2.100.000 ha	10.500.000 ha (K)	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	228,3
		Terlaksananya percepatan legalisasi aset pertanahan, ketertiban administrasi pertanahan dan kelengkapan informasi legalitas aset tanah	Jumlah bidang tanah yang dilegalisasi (Prioritas Nasional 7)	326.237 bidang	4.063.430 bidang (K)	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	2.229,9
b	Pengukuran Dasar (Prioritas Bidang)	Bertambahnya luas wilayah yang telah diukur di dalam sistem referensi sesuai standar	Luas wilayah Indonesia yang telah terukur di dalam sistem referensi sesuai standar	20%	100%	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	65,4
c	Pemetaan Dasar (Prioritas Bidang)	Terlaksananya survei dan pemetaan dasar sesuai Standar Operasi dan Prosedur (SOP)	Jumlah peta dasar pertanahan yang dibuat sesuai standar	20%	100%	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	58,6
d	Pengaturan dan Penetapan Hak tanah (Prioritas Bidang)	Tersedianya rumusan kebijakan teknis dibidang pengaturan dan penetapan hak tanah serta meningkatnya pelaksanaan penetapan dan perizinan hak tanah.	Jumlah penetapan dan perizinan hak atas tanah (SK)	20%	100%	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	9,1
e	Peningkatan Kualitas Pengukuran, Pemetaan, dan Informasi Bidang Tanah, Ruang dan Perairan (Prioritas Bidang)	Terlaksananya pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah, ruang dan perairan yang berkualitas.	Jumlah penetapan batas dan pembangunan sistem informasi atas HGU, HGB, HPL dan HP	20%	100%	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	170,3
f	Peningkatan Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang (Prioritas Bidang)	Terwujudnya pembinaan dan pengelolaan pendaftaran hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, tanah wakaf, guna ruang dan perairan, serta PPAT	Pembinaan dan pengelolaan hak atas tanah dan guna ruang	20%	100%	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	54,4

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Reforma Agraria

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014*			
II	Fokus 2: Pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) termasuk pengurangan tanah terlantar	Berkurangnya konsentrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T)	Terlaksananya redistribusi tanah					1.654,4
a	Pengelolaan Pertanahan Propinsi	Terlaksananya pengaturan dan penataan penguasaan dan pemilikan tanah serta pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal.	Neraca Penatagunaan Tanah di daerah (Prioritas Nasional 6)	100 kab/kota	500 kab/kota (K)	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	54,9
			Inventarisasi P4T (Prioritas Nasional 6)	335.665 bidang	1.678.325 bidang (K)	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	366,3
		Terlaksananya redistribusi tanah	Jumlah bidang tanah yang telah didistribusi (Prioritas Nasional 4)	210.000 Bidang	1.050.000 Bidang (K)	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	912,7
		Terwujudnya pengendalian penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan akses terhadap sumber ekonomi	Inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi terlantar (Prioritas Nasional 8)	75.900 ha	379.500 ha (K)	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	36,3
		Data hasil inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT)	Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) (Prioritas Nasional 10)	200 SP	885 SP (K)	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	98,8
b	Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) (di pusat)	Data hasil inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT)	Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) (Prioritas Nasional 10)	1 Paket	5 Paket (K)	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	29,6
c	Pengelolaan Landreform (Prioritas Bidang)	Meningkatnya jumlah tanah negara yang ditegaskan menjadi Tanah Obyek Landreform (TOL) dan atau yang dikeluarkan dari TOL	Jumlah tanah negara yang ditegaskan menjadi Tanah Obyek Landreform (TOL) dan atau yang dikeluarkan dari TOL	20%	100%	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	36,6

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Reforma Agraria

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014*			
d	Pengembangan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Penatagunaan Tanah (Prioritas Bidang)	Bertambahnya jumlah kabupaten/kota yg telah memiliki neraca penatagunaan tanah dan mengidentifikasi ketersediaan tanah untuk pembangunan	Jumlah kab/kota yang telah menyusun neraca penatagunaan tanah & mengidentifikasi ketersediaan tanah untuk pembangunan	20%	100%	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	51,0
e	Pengelolaan Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Tanah Kritis (Prioritas Bidang)	Terselenggaranya pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan kritis	Jumlah analisa ketersediaan tanah untuk kepentingan masyarakat, pemerintah, dan badan usaha	20%	100%	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	10,8
f	Pengelolaan Konsolidasi Tanah (Prioritas Bidang)	Meningkatnya jumlah bidang tanah yang dikonsolidasikan	Jumlah obyek potensi konsolidasi tanah	20%	100%	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	26,6
g	Pengendalian Pertanahan (Prioritas Bidang)	Menurunnya luas tanah yang terindikasi terlantar	Luas tanah yang terindikasi terlantar	20%	100%	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	20,0
h	Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Pertanahan (Prioritas Bidang)	Terselenggaranya akses masyarakat dan lembaga terhadap penguatan hak atas tanah, dan sumber permodalan dan produksi	Akses masyarakat dan lembaga terhadap penguatan hak atas tanah	20%	100%	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	10,8
III	Fokus 3: Peningkatan Kinerja Pelayanan Pertanahan	Terselenggaranya pelayanan yang transparan dan akuntabel	Tersedianya prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur (SPOPP)					581,8
a	Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan	Tersedianya data dan informasi pertanahan yang terintegrasi secara nasional dalam rangka pengembangan (Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional / SIMTANAS)	Peningkatan akses layanan pertanahan melalui Larasita (Prioritas Nasional 7)	156 kab/kota	419 kab/kota	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	BPN	254,3
b	Pembinaan Organisasi Dan Pengelolaan Kepegawaian BPN (Prioritas Bidang)	Terlaksananya penataan organisasi dan layanan kepegawaian	Tersedianya konsep kelembagaan serta prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur (SPOPP)	1 paket	5 paket (K)	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	BPN	39,1
c	Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Pendidikan STPN	Tersedianya sumberdaya manusia lulusan program Diploma, Pendidikan khusus, spesialis, S1, S2	Jumlah lulusan program Diploma, Pendidikan khusus, spesialis, S1, S2	20%	100%	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	BPN	12,1

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Reforma Agraria

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014*			
d	Pendidikan dan pelatihan bidang pertanahan (Prioritas Bidang)	Terselenggaranya layanan pertanahan yang profesional	Jumlah SDM yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan	2.630 orang	14.150 orang (K)	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	BPN	47,1
e	Pengelolaan Sarana dan Prasarana (pusat) (prioritas bidang)	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana BPN RI	Pengembangan sarana prasarana pelayanan pertanahan	-	1 satker (K)	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur BPN RI	BPN	3,5
f	Pengelolaan Sarana dan Prasarana (daerah) (prioritas bidang)	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Kanwil BPN Provinsi	Pengembangan sarana prasarana pelayanan pertanahan	25 satker	325 satker (K)	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur BPN RI	BPN	519,1
IV	Fokus 4: Penataan dan Penegakan Hukum Pertanahan serta Pengurangan Potensi Sengketa Tanah	Tersedianya peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk kepastian hukum pertanahan	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan yang selesai disusun					260,2
a	Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanahan dan Hubungan Masyarakat (Prioritas Nasional dan Prioritas Bidang)	Terlaksananya pengembangan peraturan perundangan bidang pertanahan dan Hubungan Masyarakat	Jumlah paket rancangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang pertanahan dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Prioritas Nasional 5)	1 paket	5 paket (K)	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	BPN	19,3
		Tersusunnya peraturan perundangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Prioritas Nasional 6)	1 paket	5 paket (K)	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	BPN	10,4	
b	Pengelolaan Pertanahan Provinsi	Berkurangnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan serta mencegah timbulnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan	Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan (Prioritas Nasional 7)	2.791 kasus	13.955 kasus (K)	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	108,0
c	Survey Potensi Tanah (Prioritas Bidang)	Tersedianya Peta Nilai Potensi Tanah Sesuai Standar Operasi dan Prosedur (SOP) sebagai referensi dan indikator ekonomi tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat	Peta dan informasi potensi nilai tanah dan kawasan	20%	100%	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	67,3

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Reforma Agraria

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010 - 2014 (Rp. Miliar)
				2010	2014*			
d	Pengaturan dan pengadaan tanah dan legalisasi tanah instansi pemerintah, dan BUMN/ BUMD (Prioritas Bidang)	Terlaksananya pengaturan pengadaan tanah pemerintah, penetapan hak atas tanah dan hak pengelolaan instansi pemerintah & BUMN/BUMD	Jumlah penetapan hak atas tanah dan hak pengelolaan	20%	100%	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	12,2
e	Pengkajian, Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Prioritas Bidang)	Berkurangnya jumlah sengketa pertanahan	Jumlah penyelesaian sengketa tanah	20%	100%	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	15,8
f	Pengkajian dan Penanganan Konflik Pertanahan (Prioritas Bidang)	Berkurangnya jumlah konflik pertanahan	Jumlah penanganan konflik tanah	20%	100%	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	13,6
g	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pertanahan (Prioritas Bidang)	Terlaksananya penanganan dan penyelesaian perkara pertanahan secara berkualitas	Jumlah perkara yang ditangani dan diselesaikan oleh BPN RI	20%	100%	Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN	13,6
TOTAL								5.312,6

Keterangan :

K) Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perkotaan

No	Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Menyiapkan kebijakan pembangunan perkotaan dan meningkatkan sinkronisasi peraturan perundangan terkait pembangunan perkotaan	Terlaksananya penyiapan kebijakan pembangunan perkotaan dan sinkronisasi peraturan perundangan terkait pembangunan perkotaan.	1.Tersusunnya UU Perkotaan 2.Jumlah forum koordinasi pembangunan perkotaan tingkat provinsi 3. Jumlah NSPK bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan 3. Jumlah NSPK bidang permukiman 4. Jumlah kajian strategi pengembangan kelembagaan inovasi perencanaan (e-planning), penetapan zonasi kegiatan di kota dan penetapan bank lahan untuk pembangunan di perkotaan					125,5
a	Fasilitasi pembangunan kawasan perkotaan	Tersusunnya UU ttg Perkotaan	Jumlah naskah akademis Jumlah rancangan UU ttg Perkotaan Jumlah uji publik RUU Perkotaan Jumlah UU		1 K) 1 K) 1 K) 1 K)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri	1,0 1,0 0,5 2,5
		Terbentuknya forum koordinasi	Jumlah pedoman Jumlah forum koordinasi pembangunan perkotaan tingkat provinsi di 5 wilayah pulau besar		1 K) 15 K)			1,0 3,0

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perkotaan

No	Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
b	Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan dalam penataan bangunan dan lingkungan termasuk pengelolaan gedung dan rumah negara	Tersusunnya Rencana Tindak Sistem Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah kab/kota yang mendapat fasilitasi penyusunan Rencana Tindak Sistem Ruang Terbuka Hijau (RTH)	33	213 ^{k)}	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian Pekerjaan Umum	66,0
		Termanfaatkannya produk pengaturan bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah NSPK bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan	7	37 ^{k)}			19,0
c	Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan dalam pengembangan permukiman	Tersusunnya NSPK nasional bidang pengembangan permukiman	Jumlah NSPK nasional bidang permukiman	2	5 ^{k)}			7,0
d	Perencanaan tata ruang serta koordinasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan metropolitan serta pembinaan pelaksanaan pengembangan permukiman	Tersusunnya strategi pengembangan kelembagaan inovasi perencanaan (<i>e-planning</i>), penetapan zonasi kegiatan di kota dan penetapan bank lahan untuk pembangunan di perkotaan	Jumlah kajian strategi pengembangan kelembagaan inovasi perencanaan (<i>e-planning</i>), penetapan zonasi kegiatan di kota dan penetapan bank lahan untuk pembangunan di perkotaan	3	15 ^{k)}	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kementerian Pekerjaan Umum	24,5
II	Menurunkan tingkat kemiskinan perkotaan	Berkurangnya penduduk miskin di perkotaan	1. Persentase penurunan jumlah penduduk miskin di perkotaan 2. Jumlah kota yang telah memiliki Peraturan Daerah tentang penyediaan perumahan untuk MBR.					5.947,5

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perkotaan

No	Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			3.Tersusunnya pedoman peningkatan peran PKL dan peremajaan kawasan kumuh perkotaan.					
a	Fasilitasi pembangunan kawasan perkotaan	Tersedianya Peraturan Daerah tentang penyediaan perumahan untuk MBR.	Jumlah Peraturan Daerah berkaitan dgn penyediaan perumahan bagi MBR di kawasan perkotaan.		40 ^{K)}	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri	2,0
		Tersusunnya pedoman peningkatan peran PKL dan peremajaan kawasan kumuh perkotaan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di perkotaan.	Jumlah kebijakan/pedoman	1 rancangan pedoman	1 ^{K)}			1,0
			Jumlah personil Pemda dan masy yang mengikuti training .		400 ^{K)}			1,5
b	Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan dalam penataan bangunan dan lingkungan termasuk pengelolaan gedung dan rumah negara	Termanfaatkannya kelurahan/desa dalam pendampingan pemberdayaan masyarakat PNPm-P2KP	Jumlah Kelurahan/Desa yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan sosial (P2KP/PNPM)	9.556	20.293 ^{K)}	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian Pekerjaan Umum	5.943,0
III	Menurunkan tingkat kerawanan sosial dan kriminalitas di perkotaan	Menurunnya tingkat kerawanan sosial dan kriminalitas di perkotaan	Jumlah kebijakan/pedoman Depdagri terkait dgn pengendalian masalah sosial dan penyakit menular di kawasan perkotaan.					2,6
a	Fasilitasi pembangunan kawasan perkotaan	Tersusunnya kebijakan Depdagri terkait dgn pengendalian masalah sosial dan penyakit menular di kawasan perkotaan.	Jumlah kebijakan/pedoman	1 ranc. pedoman	1 ^{K)}	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri	1,1

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perkotaan

No	Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Jumlah prov, kab/kota yang mendapat fasilitasi Pemda dalam mengoptimalkan pengendalian masalah sosial dan penyakit menular.		28 provinsi ^{K)} dan 120 kab/kota			1,5
IV	Meningkatkan pemanfaatan modal sosial dan budaya di perkotaan	Meningkatnya pemanfaatan modal sosial dan budaya di perkotaan	<p>1. Tersusunnya pedoman penguatan peran lembaga masyarakat dalam pembangunan perkotaan</p> <p>2. Tersusunnya pedoman pengelolaan bangunan warisan budaya di perkotaan</p> <p>3. Jumlah daerah yang memiliki perda tentang pengelolaan bangunan warisan budaya</p>					6,4
a	Fasilitasi pembangunan kawasan perkotaan	Tersusunnya pedoman dalam rangka penguatan peran lembaga masyarakat perkotaan dalam peran sertanya bagi percepatan pemb.perkotaan.	Jumlah pedoman.	1 rancangan pedoman	1 ^{K)}	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri	1,9
		Tersusunnya pedoman pengelolaan dan pelestarian bangunan warisan budaya di perkotaan	Jumlah kelembagaan masyarakat (LKM) yang difasilitasi		200 ^{K)}			1,5
		Terfasilitasinya pemda dalam penyusunan kebijakan daerah tentang pengelolaan dan pelestarian bangunan warisan budaya	Jumlah naskah akademis	1	1 ^{K)}			0,5
			Jumlah pedoman		1 ^{K)}			1,0
			Jumlah kota yang memiliki perda tentang pengelolaan dan pelestarian bangunan warisan budaya		25 ^{K)}			1,5

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perkotaan

No	Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
V	Menguatkan kelembagaan dan kerjasama antar kota	Menguatnya kelembagaan dan kerjasama antar kota	1. Tersusunnya database kawasan perkotaan seluruh Indonesia 2. Tersusunnya pedoman pembentukan lembaga/badan pengelola kawasan perkotaan 3. Jumlah kerjasama <i>sister city</i> dan <i>city sharing</i> 4. Jumlah Badan Kerjasama Kawasan Metropolitan yang terbentuk. 5. Jumlah pedoman pembentukan, batas, fungsi dan luas kawasan perkotaan					63,6
a	Fasilitasi pembangunan kawasan perkotaan	Terbangunnya sistem informasi dan data base perkotaan yang terintegrasi mulai dari kab/kota, provinsi dan pusat.	Jumlah data tipologi kawasan perkotaan seluruh Indonesia.	1	1 K)	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri	1,2
			Jumlah aplikasi data base sistem informasi kawasan perkotaan	1	1 K)			0,8
			Jumlah kab/kota, provinsi yang memiliki data base dan terintegrasi dalam satu sistem informasi kawasan perkotaan		140 K)			14,0
		Terbentuknya lembaga dan badan pengelola kawasan perkotaan	Tersusunnya pedoman pembentukan lembaga/badan pengelola kawasan perkotaan	1 ranc. pedoman	1 K)			1,1

BIDANG PEMBANGUNAN

: WILAYAH DAN TATA RUANG

PRIORITAS BIDANG

: Pembangunan Perkotaan

No	Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Jumlah kota yang difasilitasi dalam untuk penyiapan pola pengelolaan kawasan perkotaan		15 K)			0,9
		Terumuskannya kebijakan Depdagri terkait dengan percepatan pembangunan sanitasi perkotaan	Jumlah kab/kota yang terfasilitasi dalam pembentukan Pokja.	49	365 K)			4,8
			Jumlah kebijakan/pedoman		1 K)			0,8
		Terlaksananya kerjasama city sharing	Jumlah Best Practices Perkotaan Unggulan	4	20 K)			1,3
			Jumlah Kerjasama City Sharing	10	50 K)			1,4
		Terlaksananya kerjasama sister city	Jumlah kerjasama sister city	4	20 K)			0,8
			Jumlah Kerjasama Sister City yang berjalan (terlaksana)	10	50 K)			1,0
		Terlaksananya Kerjasama Pembangunan Perkotaan Kawasan Metropolitan	Jumlah Badan Kerjasama Kawasan Metropolitan yang terbentuk.	1	9 K)			4,1
			Jumlah Rencana Objek Kerjasama yang tersusun scr memadai	2	22 K)			9,0
		Tertatanya batas, fungsi, nama dan luas kawasan perkotaan non otonom	Jumlah pedoman pembentukan, batas, fungsi dan luas kawasan perkotaan	1	1 K)			0,6
			Jumlah supervisi dan fasilitasi pembentukan, batas, fungsi dan luas kawasan perkotaan		80 K)			2,0

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perkotaan

No	Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
b	Perencanaan tata ruang serta koordinasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan metropolitan serta pembinaan pelaksanaan pengembangan permukiman	Terselenggaranya penyediaan basis data dan informasi perkotaan	Jumlah pemutakhiran basis data informasi perkotaan	1	5 ^{k)}	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kementerian Pekerjaan Umum	20,0
VI	Menguatkan kapasitas pemerintah kota dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan perkotaan serta penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik	Menguatnya kapasitas pemerintah kota dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan perkotaan serta menguatnya penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik	Jumlah kab/kota yang memperoleh pendampingan penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIK)					292,0
a	Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan dalam pengembangan permukiman	Tersusunnya Strategi Pembangunan Permukiman dan dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIK) di daerah	Jumlah kab/kota yang memperoleh pendampingan penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIK)	50	207 ^{k)}	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian Pekerjaan Umum	292,0
VII	Meningkatkan penanganan polusi lingkungan dan mitigasi bencana dalam pengelolaan perkotaan	Meningkatnya penanganan polusi lingkungan dan mitigasi bencana secara terpadu dalam pengelolaan perkotaan	1. Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam penyusunan Perda tentang pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana					63,5

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perkotaan

No	Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			2. Jumlah kota pusaka, rawan bencana, dan pemenang PKPD yang ditingkatkan kualitas pengembangan perkotaan dan kapasitas kelembagaannya					
a	Fasilitasi pembangunan kawasan perkotaan	Terlaksananya fasilitasi pemda dalam penyusunan perda pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana	Jumlah kota terfasilitasi.		45 ^{k)}	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri	1,5
b	Perencanaan tata ruang serta koordinasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan metropolitan serta pembinaan pelaksanaan pengembangan permukiman	Meningkatnya upaya pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana alam dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan perkotaan	Jumlah kota pusaka, rawan bencana, dan pemenang PKPD yang ditingkatkan kualitas pengembangan perkotaan dan kapasitas kelembagaannya	3	31 ^{k)}	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kementerian Pekerjaan Umum	62,0
VIII	Meningkatkan investasi dan pembangunan ekonomi di perkotaan	Meningkatnya investasi dan pembangunan ekonomi di perkotaan	1. Jumlah daerah yang telah menerapkan modernisasi pengelolaan pasar tradisional 2. Persentase pertumbuhan ekonomi (PDRB dan PAD) di perkotaan					3,8
a	Fasilitasi pembangunan kawasan perkotaan	Tersusun dan terlaksananya kebijakan tentang pengelolaan pasar tradisional	Jumlah kebijakan Jumlah kota yang memiliki kebijakan tentang pengelolaan pasar tradisional Jumlah evaluasi kota yang telah menerapkan modernisasi pengelolaan pasar tradisional		1 ^{k)} 15 ^{k)} 10 ^{k)}	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri	0,5 2,3 1,0

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perkotaan

No	Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
IX	Menyediakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Perkotaan	Tersedianya pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan perkotaan	Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan					2.114,0
a	Fasilitasi pembangunan kawasan perkotaan	Tersusunnya Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan (kebijakan mengenai jenis-jenis pelayanan yang harus tersedia dalam suatu kawasan perkotaan)	Jumlah kebijakan/pedoman Jumlah prov, kab/kota yang difasilitasi dan disiapkan kebutuhan perencanaan pembangunan perkotaan sesuai SPP	1	1 ^{K)}	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri	0,5 1,5
		Terlaksananya penilaian terhadap daerah yang mengikuti IMP Award	Jumlah penghargaan IMP Jumlah dokumen evaluasi dan penyempurnaan sistem penilaian IMP Award	15	45 ^{K)} 2 ^{K)}			3,1 1,0
		Terfasilitasi dan tersupervisinya penyelenggaraan penyerahan aset PSU dari pengembang ke Pemda	Jumlah Prov, kab/kota yang terfasilitasi dan tersupervisi dalam penyelenggaraan penyerahan aset PSU dari pengembang ke Pemda	5 prov, 10 kab/kota	25 prov, 50 kab/kota ^{K)}			2,0
			Jumlah prov, kab/kota yang terfasilitasi dalam penyusunan Perda terkait PSU di daerah		10 kab/kota dari 3 provinsi			2,0
		Tersusunnya standar pengukuran besaran RTH kawasan perkotaan dan perda terkait RTH di kawasan perkotaan.	Jumlah kebijakan/dokumen Jumlah Kabupaten/kota yang terfasilitasi	1 konsep rancangan dokumen.	1 ^{K)} 28 ^{K)}			2,1 2,8

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perkotaan

No	Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
b	Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan dalam penataan bangunan dan lingkungan termasuk pengelolaan gedung dan rumah negara	Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau pada lingkungan permukiman yang setara dengan 369 Ha	Jumlah Kawasan setara 369 Ha yang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana Ruang terbuka Hijau	39	207 ^{K)}	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian Pekerjaan Umum	562,0
		Meningkatnya jumlah kawasan yang meningkat kualitasnya yang setara dengan 7.380 Ha	Jumlah Kawasan setara 7.380 Ha yang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana pada kawasan yang direvitalisasi	32	152 ^{K)}			1.137,0
		Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman tradisional dan bersejarah yang setara dengan 442 Ha	Jumlah kawasan setara 442 Ha yang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana pada pemukiman tradisional dan bersejarah	65	160 ^{K)}			400,0
X	Meningkatkan implementasi rencana tata ruang perkotaan dan pengendalian pemanfaatan ruang perkotaan	Meningkatnya implementasi rencana tata ruang perkotaan dan pengendalian pemanfaatan ruang perkotaan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana pemanfaatan ruang					88,3
a	Fasilitasi pembangunan kawasan	Terlaksananya fasilitasi pemda dalam	Jumlah daerah terfasilitasi.		31 ^{K)}	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri	1,4
			Jumlah daerah yang memiliki perda ttg Pemberian IMB		31 ^{K)}			1,4
		Meningkatnya kinerja pemerintah daerah dalam perencanaan perkotaan dan melaksanakan tertib ruang	Jumlah daerah yg terfasilitasi dalam penyelenggaraan perencanaan di kawasan perkotaan	10	50 ^{K)}			4,9
			Jumlah pedoman koordinasi pengawasan dan pengendalian pembangunan perkotaan		1 ^{K)}			0,5

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perkotaan

No	Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Jumlah kegiatan koordinasi pengawasan dan pengendalian provinsi (5 wilayah)		15 ^{k)}			4,5
			Jumlah hasil evaluasi kinerja pemda dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan perkotaan		3 ^{k)}			1,5
b	Perencanaan tata ruang serta koordinasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan metropolitan serta pembinaan pelaksanaan pengembangan permukiman	Terlaksananya pengembangan perkotaan beserta kapasitas kelembagaannya, terutama kota-kota baru dan kota-kota yang berkembang pesat	Jumlah kota yang memperoleh pembinaan teknis pelaksanaan pengembangan perkotaan dan kapasitas kelembagaannya	18	109 ^{k)}	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kementerian Pekerjaan Umum	74,1
TOTAL								8.707,1

Keterangan :

^{k)} Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perdesaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Menguatkan kapasitas dan peran desa dan tata kelola pemerintahan desa yang baik	Menguatnya kapasitas dan peran pemerintahan desa, lembaga-lembaga desa serta kelembagaan masyarakat, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik	1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan 2. Pelaksanaan Tata pemerintahan yang baik					498,3
a.	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis dan efektif dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat. Mengembangkan manajemen pemerintahan desa yang efektif, dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah fasilitasi pelayanan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan melalui Bintek konsolidasi, inventarisasi serta penyusunan UU tentang Desa. Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan melalui Bintek, inventarisasi dan pendataan keuangan dan aset desa, pengembangan desa wisata sebagai sumber PAD 	33 Prov 86 Kab 1 Produk Hukum	33 Prov 100 Kab	Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	58,0
				15 Provinsi 30 Kabupaten	32 Provinsi 192 Kab			17,6

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perdesaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		· Memperkuat kemampuan Perangkat Desa dan anggota Badan Perwakilan Desa, agar mampu menyelenggarakan pemerintahan desa secara demokratis dan efektif.	· Jumlah fasilitasi pengembangan desa dan kelurahan melalui penetapan indikator keberhasilan pemdes, penetapan dan penegasan, pemetaan batas wilayah desa, penyusunan data based desa dan kelurahan, bimtek, dan koordinasi.	8 Provinsi, 10 Kabupaten, 20 Desa	32 Provinsi 64 Kabupaten 128 Desa			40,1
		· Meningkatnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa.	· Jumlah fasilitasi peningkatan kapasitas aparat desa dan kelurahan	600 Orang dari 32 Provinsi, 18 Kab/Kota	1000 Orang dari 32 Provinsi, 32 Kab/Kota	Bimtek peningkatan kapasitas		22,0
			· Jumlah fasilitasi pematapan Badan Permusyawaratan Desa melalui Bintek, Orientasi, Koordinasi, Monitoring dan evaluasi	15 Provinsi 30 Kabupaten 60 BPD	32 Provinsi 192 Kab 384 BPD			25,7
b.	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Dan Desa Lingkup Regional	· Meningkatkan kapasitas Aparat dan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.	· Jumlah pelatihan di bidang pemberdayaan aparatur desa/kelurahan sesuai standar	27 Angkt	147 Angkt ^{KS)}	Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	58,6
			· Jumlah pelatihan di bidang pemberdayaan lembaga masyarakat desa/kelurahan sesuai standar	30 Angkt	174 Angkt ^{KS)}			84,3

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perdesaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)		
				2010	2014					
			· Biaya rata-rata pelayanan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, administrasi umum, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga.	100%	100%			61,6		
c.	Pengembangan Peran Serta Masyarakat dalam pembangunan transmigrasi	· Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pembangunan transmigrasi pada Daerah Tertinggal	· Instansi yang bekerjasama mendukung program transmigrasi	16 lembaga	80 lembaga ^{KJ}	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kemen. Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Ditjen P4T	7,1		
			· Kabupaten/Kota yang bersedia melaksanakan pembangunan transmigrasi	96 kab	104 kab			31,5		
			· Minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi	19.600 kel	106.030 kel ^{KJ}			13,0		
			· Kesepakatan bersama antar Prov dan Perjanjian KSAD antar Kab/Kota	23 kab	26 kab			6,5		
			· Nilai rencana investasi yang akan dikembangkan oleh Badan Usaha	1,4 trilyun	8,8 trilyun ^{KJ}			6,9		
		· Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pembangunan transmigrasi pada Daerah Perbatasan	· Instansi yang bekerjasama mendukung program transmigrasi	16 lembaga	80 lembaga ^{KJ}			Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kemen. Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Ditjen P4T	4,8
			· Kabupaten/Kota yang bersedia melaksanakan pembangunan transmigrasi	96 kab	104 kab					21,0
			· Minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi	19.600 kel	106.030 kel ^{KJ}					8,6

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perdesaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			· Kesepakatan bersama antar Prov dan Perjanjian KSAD antar Kab/Kota	23 kab	26 kab			4,3
			· Nilai rencana investasi yang akan dikembangkan oleh Badan Usaha	1,4 trilyun	8,8 trilyun ^{K)}			0,2
		· Meningkatnya perantara masyarakat dalam pembangunan transmigrasi pada wilayah strategis	· Instansi yang bekerjasama mendukung program transmigrasi	4 lembaga	20 lembaga ^{K)}	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kemen. Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Ditjen P4T	2,3
			· Kabupaten/Kota yang bersedia melaksanakan pembangunan transmigrasi	24 kab	26 kab			13,1
			· Minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi	4.900 kel	26.530 kel ^{K)}			5,4
			· Kesepakatan bersama antar Prov dan Perjanjian KSAD antar Kab/Kota	6 kab	7 kab			2,7
			· Nilai rencana investasi yang akan dikembangkan oleh Badan Usaha	0,4 trilyun	2,7 trilyun ^{K)}			2,9

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pembangunan Perdesaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMB AGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
II.	Meningkatkan kualitas dasar sumber daya manusia perdesaan	Terciptanya peningkatan kualitas dasar masyarakat di kawasan perdesaan	1. Tingkat pendidikan 2. Tingkat harapan hidup 3. Tingkat kualitas hidup masyarakat perdesaan termasuk masyarakat di Kawasan Transmigrasi					612,7
a.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> · Meningkatnya penguatan kelembagaan perdesaan di permukiman transmigrasi pada Daerah Tertinggal · Meningkatnya kapasitas aparat dalam pengelolaan dan pelayanan bagi masyarakat di kawasan transmigrasi pada Daerah Tertinggal · Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam proses pengembangan di kawasan transmigrasi pada Daerah Tertinggal · Meningkatnya peran serta lintas sektor, swasta dan masyarakat di kawasan transmigrasi pada Daerah Tertinggal · Terciptanya peningkatan kualitas dasar masyarakat di Kawasan Transmigrasi pada Daerah Tertinggal 	<ul style="list-style-type: none"> · Jumlah kelembagaan masyarakat yang mandiri · Jumlah aparat yang memiliki kapasitas pengelolaan dan pelayanan di Kawasan Transmigrasi · Jumlah fasilitasi kegiatan yang dilakukan; · Jumlah pelatihan dan pendampingan yang diberikan · Jumlah lintas sector yang berperan · Jumlah swasta / investor · Jumlah masyarakat transmigrasi · Bantuan Pendidikan · Bantuan Kesehatan · Pelayanan Mental spiritual 	<ul style="list-style-type: none"> 10 lembaga 144 kimtrans 12 bln 12 kali 5 LS 9 34.861 Kel 27.925 Kel 36.861 Kel 131 Kel 	<ul style="list-style-type: none"> 127 Lembaga ^{K)} 743 kimtrans ^{K)} 60 bln ^{K)} 60 kali ^{K)} 36 LS ^{K)} 59 ^{K)} 197.550 Kel ^{K)} 165.904 Kel ^{K)} 200.052 Kel ^{K)} 735 Kel ^{K)} 	Pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ditjen P2MKT	<ul style="list-style-type: none"> 19,9 5,7 2,7 2,7 10,3 3,8 15,3 81,6 80,8 69,9

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pembangunan Perdesaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMB AGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		- Meningkatnya penguatan kelembagaan perdesaan di permukiman transmigrasi pada Daerah Perbatasan	- Jumlah kelembagaan masyarakat yang mandiri	10 lembaga	28 lembaga ^{K)}			13,2
		- Meningkatnya kapasitas aparat dalam pengelolaan dan pelayanan bagi masyarakat di kawasan transmigrasi pada Daerah Perbatasan	- Jumlah aparat yang memiliki kapasitas pengelolaan dan pelayanan di Kawasan Transmigrasi	26 kimtrans	107 kimtrans ^{K)}			0,9
		- Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam proses pengembangan di kawasan transmigrasi pada Daerah Perbatasan	- Jumlah fasilitasi kegiatan yang dilakukan;	12 bln	60 bln ^{K)}			0,4
			- Jumlah pelatihan dan pendampingan yang diberikan	12 bln	60 bln ^{K)}			0,4
		- Meningkatnya peran serta lintas sector, swasta dan masyarakat di kawasan transmigrasi pada Daerah Perbatasan	- Jumlah lintas sector yang berperan	1 LS	33 LS ^{K)}			1,6
			- Jumlah swasta / investor	2	10 ^{K)}			0,5
			- Jumlah masyarakat transmigrasi	41.013 Kel	226.652 Kel ^{K)}			19,2
		- Terciptanya pe-ningkatan kualitas dasar masyarakat di Kawasan Transmigrasi pada Daerah Perbatasan	- Bantuan Pendidikan	4.928 Kel	23.456 Kel ^{K)}			10,8
			- Bantuan Kesehatan	4.152 Kel	26.591 Kel ^{K)}			12,8
			- Pelayanan Mental spiritual	23 Kel	105 Kel ^{K)}			11,8
		- Meningkatnya penguatan kelembagaan perdesaan di permukiman transmigrasi pada Wilayah Strategis	- Jumlah kelembagaan masyarakat yang mandiri	6 lembaga	43 lembaga ^{K)}			5,4

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pembangunan Perdesaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMB AGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		· Meningkatnya kapasitas aparat dalam pengelolaan dan pelayanan bagi masyarakat di kawasan transmigrasi pada Wilayah Strategis	· Jumlah aparat yang memiliki kapasitas pengelolaan dan pelayanan di Kawasan Transmigrasi	77 UPT	385 UPT ^{K)}			3,0
		· Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam proses pengembangan di kawasan transmigrasi pada Wilayah Strategis	· Jumlah pelatihan dan pendampingan yang diberikan	12 kali	60 kali ^{K)}			2,1
		· Meningkatnya peran serta lintas sektor, swasta dan masyarakat di kawasan transmigrasi pada Wilayah Strategis	· Jumlah lintas sektor yang berperan	6 Ls	43 Ls ^{K)}			5,3
			■ Jumlah swasta / investor	11	69 ^{K)}			1,5
			■ Jumlah masyarakat transmigrasi	10.254 Kel	56.666 Kel ^{K)}			5,0
		■ Terciptanya peningkatan kualitas dasar masyarakat di Kawasan Transmigrasi pada Wilayah Strategis	■ Bantuan Pendidikan	8.214 Kel	47.420 Kel ^{K)}			17,8
			■ Bantuan Kesehatan	10.254 kel	56.666 Kel ^{K)}			18,9
			■ Pelayanan Mental spiritual	35 Kel	207 Kel ^{K)}			20,5
b.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Pelatihan Masyarakat	■ Pelayanan pengembangan kelembagaan dan pelatihan masyarakat sesuai standar.	■ Jumlah pelatihan yang diberikan bagi masyarakat perdesaan melalui penyusunan kurikulum dan modul, pelatihan, sinkronisasi, TOT;	12 Angkt 480 orang dari 32 Prov	25 Angkt 1000 orang dari 32 Prov	Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	27,6
			■ Jumlah fasilitasi pendataan potensi desa melalui Pedataan dan Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan, Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan	33 prov, 394 Kab 5 Kelurahan dan 5 Desa	33 prov, 468 Kab 5 Kelurahan dan 5 Desa			56,5

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perdesaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Program dan Kegiatan masuk desa dan peningkatan system perencanaan partisipatif melalui Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan dan Monitoring dan evaluasi. 	12 Kegiatan di 32 Provinsi, 12 Kabupaten	32 Kegiatan di 32 Provinsi, 32 Kabupaten			17,5
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah penataan ruangan kawasan pedesaan melalui fasilitasi Pemda dalam penyusunan perda tentang tata ruang kawasan pedesaan, pengembangan Pusat pertumbuhan antar desa (PPTAD), bimtek, dan koordinasi. 	10 Kab. di 10 Provinsi	50 Kab di 25 Provinsi			41,0
		<ul style="list-style-type: none"> Menata kembali peranan dan fungsi lembaga masyarakat, khususnya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Atau Sebutan Lain. 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Fasilitasi penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan di desa melalui Bimtek, pelatihan, pendataan 	33 prov kab 468 12 lkeg	33 prov kab 468 12 lkeg			26,7

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perdesaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
III.	Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan	Menguatnya kapasitas pemerintahan dan masyarakat untuk meningkatkan potensi kelembagaan, modal sosial, dan budaya dalam proses pembangunan	Tingkat kemandirian masyarakat dan kelembagaan					49.231,3
a.	Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat	· Pelayanan pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat sesuai standar.	· Jumlah fasilitasi kesejahteraan sosial melalui Sosialisasi, Bimtek dan Identifikasi pendataan serta penguatan kelembagaan di daerah. · Jumlah fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) melalui Penguatan Kelemb. Posyandu, Pendataan Posyandu, peningk. Peran posyandu dlm kesehatan keluarga, pelaks. Bangdesmadu. · Jumlah fasilitasi tenaga kerja perdesaan yang memperoleh pembinaan dan perlindungan keselamatan kerja perdesaan melalui peningkatan kemampuan tenaga kerja pedesaan di wilayah perbatasan antar Negara, penyusunan permendagri, pelatihan dan orientasi.	33 Prov. 15 Kab	33 Prov. 36 Kab	Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	68,2
				33 prov 468 kab	33 prov 468 kab			83,5
				33 Prov 50 Kab 7 Keg.	33 Prov 50 Kab 10 Keg.			54,7

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perdesaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			· Jumlah pelaksanaan pembinaan budaya nusantara melalui inventarisasi KAT, pelestarian Adat dan Budaya Nusantara dengan pemberian stimulant kepada pemerhati adat dan budaya	15 Kab 13 Keg	50Kab 7 Keg			68,2
			· Jumlah dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan pemberdayaan perempuan melalui pendataan, bintek, dan pemberantasan buta aksara;	10 Kab. di 10 Provinsi	50 Kab di 25 Provinsi			53,8
b.	Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP)	· Pelayanan percepatan penanganan kemiskinan, pengangguran melalui pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MP) sesuai standar.	· Cakupan penerapan PNPM-MP	32 provinsi 4.791 kec, (termasuk 189 kec. Generasi, 80 kec. Perbatasan, dan 33 kab. P2SPP	32 provinsi 2.133 kec, (termasuk 95 kec. Generasi, 85 kec. Perbatasan, dan 351 kab. P2SPP	Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	48.782,0
			· Cakupan wilayah kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana, khususnya di Kab. Nias dan Nias Selatan	2 Kab/9 Kec.	2 Kab/9 Kec. ^{K)}			39,8

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pembangunan Perdesaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMB AGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
c.	Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	· Meningkatnya kualitas dan kesesuaian perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi pada Daerah Tertinggal	· Jumlah sosialisasi perencanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi	7 prov	16 prov	Pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ditjen P2MKT	6,8
			· Rencana Teknis Pembinaan Permukiman Transmigrasi	10 kimtrans	114 kimtrans ^{*)}			19,2
			· Rencana Teknis Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi	6 Kws	23 Kws ^{*)}			15,3
			· Rencana Teknis Pengembangan Kawasan Transmigrasi	5 Kws	23 Kws ^{*)}			15,7
		· Meningkatnya kualitas dan kesesuaian perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi pada Daerah Perbatasan	· Jumlah sosialisasi perencanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi	1 prov	10 prov			2,7
			· Rencana Teknis Pembinaan Permukiman Transmigrasi	2 kimtrans	16 kimtrans ^{*)}			2,5
			· Rencana Teknis pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi	1 Kws	3 Kws ^{*)}			2,1
			· Rencana Teknis pengembangan kawasan transmigrasi	1 Kws	3 Kws ^{*)}			2,2
		· Meningkatnya kualitas dan kesesuaian perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di kawasan transmigrasi pada Wilayah Strategis	· Jumlah sosialisasi perencanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi	2 kali	10 kali ^{*)}			1,0
			· Rencana Teknis Pembinaan Permukiman Transmigrasi	3 kimtrans	26 kimtrans ^{*)}			5,1
			· Rencana Teknis pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi	1 Kws	5 Kws ^{*)}			4,0
			· Rencana Teknis pengembangan kawasan transmigrasi	2 Kws	6 Kws ^{*)}			4,6

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perdesaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
IV.	Meningkatkan ekonomi perdesaan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari menurunnya tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, distribusi pendapatan yang timpang dan ketidak seimbangan struktural di perdesaan	1. Pertumbuhan ekonomi 2. Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian khususnya tanaman pangan 3. Tingkat pengangguran 4. Jumlah penduduk miskin 5. Tingkat kemiskinan					1.209,8
a.	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terwujudnya usaha ekonomi masyarakat di perdesaan yang maju, mandiri dan berorientasi pada pemenuhan permintaan pasar, dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.	· Jumlah fasilitasi pelaksanaan peningkatan usaha ekonomi keluarga melalui TOT dan pelatihan kewirausahaan, pemberian stimulan kepada kelompok masyarakat pesisir dan penguatan kelembagaan BUMKEL. · Jumlah faasilitasi Pemda dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat tertinggal termasuk PNPM PISEW. · Jumlah fasilitasi pelaksanaan usaha perkreditan dan simpan pinjam dan lembaga keuangan mikro pedesaan melalui Bintek, koordinasi, dan pemberian stimulan kepada kelompok masyarakat,	15 Kab 13 Keg	25 Kab 7 Keg	Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	20,1 69,0 33,7

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pembangunan Perdesaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMB AGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			· Prosentase Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan/UED-SP yang berfungsi	20%	70%			18,8
			· Jumlah fasilitasi pengembangan dan pengelolaan pasar desa/ pasar lokal dan pengembangan informasi pasar melalui Bintek Pengelolaan Pasar Desa bagi aparat pemerintah Desa, Pengelola Pasar dan BPD, memberikan Stimulan kepada Pasar Desa;	33 Prop 10 Kab, 20 Desa	33 Prop 10 Kab, 60 Desa			50,5
		· Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perdesaan terutama sarana prasarana pemasaran hasil produksi masyarakat desa	· Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana pemasaran hasil produksi masyarakat desa	20 pasar	235 pasar ^{k)}			31,8
b.	Pengembangan Usaha di kawasan transmigrasi	■ Berkembangnya lahan usaha produksi pertanian di permukiman/kawasan transmigrasi pada Daerah Tertinggal	■ jumlah lahan produktif di permukiman/kawa-san transmigrasi	5.654 Ha	23.576 Ha ^{k)}	Pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ditjen P2MKT	218,6
		· Meningkatnya produktivitas desa dalam pengem-bangan pangan/ komoditas unggulan di kawasan transmigrasi pada Daerah Tertinggal	■ Jumlah produktivitas lahan di permukiman kawasan transmi-grasi.	8.934 Ton	43.384 Ton ^{k)}			

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pembangunan Perdesaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMB AGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		· Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam penerapan tekno-logi tepat guna dan penyerapan informasi pasar di kawasan transmigrasi pada Daerah Tertinggal	· Jumlah usaha Pengolahan hasil	13 Unit	91 Unit ^{K)}			4,6
			· Jumlah pasar desa	11 bh	94 bh ^{K)}			4,8
			· Jumlah jaringan Pemasaran	11 bh	95 bh ^{K)}			9,6
			· Jumlah kelompok usaha peternakan	-	561 kel ^{K)}			2,8
		· Meningkatnya pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil menengah di kawasan transmigrasi pada Daerah Tertinggal	· Jumlah Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)	1 unit	5 unit ^{K)}			5,0
			· Jumlah bantuan skim kredit mikro di kawasan transmigrasi	1 SKIM	5 SKIM ^{K)}			2,0
			· Jumlah Lembaga ekonomi (koperasi /LKM-BMT Trans di permukiman transmigrasi)	32 unit	279 unit ^{K)}			2,8
		· Meningkatnya penciptaan usaha melalui iklim investasi yang kondusif di kawasan transmigrasi pada Daerah Tertinggal	· jumlah kelompok tani di kawasan Transmigrasi	23 Kel	306 Kel ^{K)}			1,8
			· Jumlah fasilitasi peningkatan iklim investasi kondusif yang menstimulasi peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha (swasta) dalam pembangunan perdesaan di kawasan transmigrasi	6 Kws	48 Kws ^{K)}			5,3
			■ Jumlah Skim Kredit untuk investasi	1 SKIM	15 SKIM ^{K)}			12,0

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pembangunan Perdesaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMB AGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Peningkatan kemandirian masyarakat dalam pemenuhan pangan baik untuk produksi/keterse-diaan, konsumsi pribadi maupun dijual kembali (pemasaran dan distribusi) di kawasan transmigrasi pada Daerah Tertinggal 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah bimbingan, pendampingan, dan pelatihan kepada masyarakat dan pengembangan lahan di kawasan transmigrasi 	16 Kws	95 Kws ^{K)}			18,9
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Berkembangnya lahan usaha produksi pertanian di permukiman/kawasan transmigrasi pada Daerah Perbatasan 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah lahan produktif di permukiman/kawa-san transmigrasi 	998 Ha	3.256 Ha ^{K)}			29,5
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya produktivitas desa dalam pengembangan pangan/ komoditas unggulan di kawasan transmigrasi pada Daerah Perbatasan 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah produktivitas lahan di permukiman kawasan transmi-grasi. 	1.577 Ton	5.979 Ton ^{K)}			
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam penerapan tekno-logi tepat guna dan penyerapan informasi pasar di kawasan transmigrasi pada Daerah Perbatasan 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah usaha Pengolahan hasil 	3 Unit	12 Unit ^{K)}			3,7
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah pasar desa 	2 bh	14 bh ^{K)}			4,2
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah jaringan Pemasaran 	2 bh	14 bh ^{K)}			9,0
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah kelompok usaha peternakan 	-	79 kel ^{K)}			3,2

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pembangunan Perdesaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMB AGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		■ Meningkatnya pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil menengah di kawasan transmigrasi pada Daerah Perbatasan	■ Jumlah Lembaga ekonomi (koperasi /LKM-BMT Trans di permukiman transmigrasi)	6 Unit	39 unit ^{K)}			0,4
			■ jumlah kelompok tani di kawasan Transmigrasi	5 Kel	42 Kel ^{K)}			0,8
		■ Meningkatnya penciptaan usaha melalui iklim investasi yang kondusif di kawasan transmigrasi pada Daerah Perbatasan	■ Jumlah fasilitasi peningkatan iklim investasi kondusif yang menstimulasi peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha (swasta) dalam pembangunan perdesaan di kawasan transmigrasi	2 Kws	12 Kws ^{K)}			2,7
			■ Jumlah Skim Kredit untuk investasi	0 SKIM	4 SKIM ^{K)}			3,2
		■ Peningkatan kemandirian masyarakat dalam pemenuhan pangan baik untuk produksi/keterse-diaan, konsumsi pribadi maupun dijual kembali (pemasaran dan distribusi) di kawasan transmigrasi pada Daerah Perbatasan	■ Jumlah bimbingan, pendampingan, dan pelatihan kepada masyarakat dan pengembangan lahan di kawasan transmigrasi	2 Kws	11 Kws ^{K)}			5,7
		■ Berkembangnya lahan usaha produksi pertanian di permukiman/ kawasan transmigrasi pada Wilayah Strategis	■ Jumlah lahan produktif di permukiman/kawa-san transmigrasi	2.778 Ha	7.792 Ha ^{K)}			52,5

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pembangunan Perdesaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMB AGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya produktivitas desa dalam pengembangan pangan/ komoditas unggulan di kawasan transmigrasi pada Wilayah Strategis 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Produktivitas lahan di permukiman/ kawasan transmigrasi 	3.878 Ton	13.666 Ton ^{K)}			
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam penerapan tekno-logi tepat guna dan penyerapan informasi pasar di kawasan transmigrasi pada Wilayah Strategis 	<ul style="list-style-type: none"> ■ jumlah usaha Pengolahan hasil 	4 unit	26 unit ^{K)}			1,3
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah pasar desa 	3 bh	27 bh ^{K)}			1,4
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah jaringan Pemasaran 	3 bh	27 bh ^{K)}			2,7
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah kelompok usaha peternakan 	-	16 kel ^{K)}			0,8
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil menengah di kawasan transmigrasi pada Wilayah Strategis 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah bantuan skim kredit mikro di kawasan transmigrasi 	1 Kws	5 Kws ^{K)}			0,5
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah Lembaga ekonomi (koperasi /LKM-BMT Trans di permukiman transmigrasi) 	10 Unit	82 unit ^{K)}			0,8
			<ul style="list-style-type: none"> ■ jumlah kelompok tani di kawasan Transmigrasi 	35 Kel	435 Kel ^{K)}			2,7

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pembangunan Perdesaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMB AGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya penciptaan usaha melalui iklim investasi yang kondusif di kawasan transmigrasi pada Wilayah Strategis 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah fasilitasi peningkatan iklim investasi kondusif yang menstimulasi peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha (swas-ta) dalam pemba-ngunan perdesaan termasuk di daerah transmigrasi 	2 Kws	15 Kws ^{K)}			1,5
		<ul style="list-style-type: none"> · Peningkatan kemandirian masyarakat dalam pemenuhan pangan baik untuk produksi/keter-sediaan, konsumsi pribadi maupun dijual kembali (pemasaran dan distribusi) di kawasan transmigrasi pada Wilayah Strategis 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah bimbingan, pendampingan, dan pelatihan kepada masyarakat dan pengembangan lahan di kawasan transmigrasi 	4 kali	23 kali ^{K)}			4,7

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pembangunan Perdesaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMB AGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
c.	Penyediaan Tanah Transmigrasi	■ Tersedianya lahan untuk pembangunan Kawasan Transmigrasi pada Daerah Tertinggal	■ Luas lahan yang tersedia (Ha)	48.000 Ha	240.000 Ha ^{K)}	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kemen. Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Ditjen P4T	3,6
			■ Luas lahan yang didukung oleh legalitas	15.360 Ha	84.316 Ha ^{K)}			29,0
			■ Luas lahan yang dibagikan	7.860 Ha	42.420 Ha ^{K)}			14,5
			■ Data tentang bidang tanah yang dibagikan transmigran	26 lok	137 lok ^{K)}			3,1
			■ Jumlah dan jenis dokumen pertanahan	2 dok	10 dok ^{K)}			13,0
			■ Prosentase penyelesaian kasus pertanahan	15%	20%			29,3
		■ Tersedianya lahan untuk pembangunan Kawasan Transmigrasi pada Daerah Perbatasan	■ Luas lahan yang tersedia (Ha)	32.000 Ha	160.000 Ha ^{K)}	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kemen. Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Ditjen P4T	2,4
			■ Luas lahan yang didukung oleh legalitas	10.240 Ha	55.984 Ha ^{K)}			19,3
			■ Luas lahan yang dibagikan	5.240 Ha	28.280 Ha ^{K)}			9,7
			■ Data tentang bidang tanah yang dibagikan transmigran	17 lok	91 lok ^{K)}			2,1
			■ Jumlah dan jenis dokumen pertanahan	2 dok	10 dok ^{K)}			8,7
			■ Prosentase penyelesaian kasus pertanahan	15%	20%			19,5
		■ Tersedianya lahan untuk pembangunan	■ Luas lahan yang tersedia (Ha)	20.000 Ha	100.000 Ha ^{K)}	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kemen. Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Ditjen P4T	1,5
			■ Luas lahan yang didukung oleh legalitas	6.400 Ha	35.240 Ha ^{K)}			15,9
			■ Luas lahan yang dibagikan	3.226 Ha	17.646 ^{K)}			6,0
			■ Data tentang bidang tanah yang dibagikan transmigran	15 lok	75 Lok ^{K)}			1,3

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perdesaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			■ Jumlah dan jenis dokumen pertanahan	2 dok	10 dok ^{K)}			5,4
			■ Prosentase penyelesaian kasus pertanahan	15%	15%			8,3
d.	Penelitian dan Pengembangan Dukungan Manajemen dan Teknis Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	■ Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan Dukungan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Terkait Pembangunan Perdesaan)	■ Jumlah hasil penelitian dan pengembangan Dukungan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dijadikan rekomendasi/kebijakan	15 Keg	95 Keg ^{K)}	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Balitfo	111,5
		■ Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan untuk pengembangan masyarakat dan Kawasan Transmigrasi yang dijadikan rekomendasi/ kebijakan (terkait pembangunan Perdesaan)	■ Jumlah hasil penelitian dan pengembangan untuk Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi yang dijadikan rekomendasi/ kebijakan	8 Keg	68 Keg ^{K)}			73,8
e.	Pengelolaan data dan informasi permukiman transmigrasi	■ Tersedianya data dan informasi permukiman transmigrasi (terkait pembangunan Perdesaan)	■ Jumlah data dan informasi permukiman transmigrasi	7 Keg	35 Keg ^{K)}	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Balitfo	116,7
		■ Tersedianya data dan informasi kawasan transmigrasi (terkait pembangunan Perdesaan)	■ Jumlah data dan informasi kawasan transmigrasi	5	25 ^{K)}			71,8

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perdesaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
V.	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana serta penataan ruang perdesaan	Meningkatnya ketersediaan dan kemudahan sarana dan prasarana perdesaan dan RTR perdesaan, termasuk di Kawasan Transmigrasi	1. Tingkat pelayanan dan akses masyarakat terhadap sarpras perdesaan 2. Tersusunnya RTR desa oleh kab/kota					3.181,2
a.	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	· Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdesaan terutama sarana prasarana pemasaran hasil produksi masyarakat desa · Tersusunnya RTR desa oleh Kab/Kota	· Tingkat pelayanan dan akses masyarakat terhadap sarpras perdesaan · Tersusunnya RTR desa oleh kab/kota	-	80 Kab 120 Kab.	Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	15,6 25,8
b.	Pengembangan Sarana dan Prasarana	· Meningkatkan fungsi dan ketersediaan sarana prasarana di kawasan transmigrasi pada Daerah Tertinggal · Meningkatkan fungsi dan ketersediaan sarana prasarana di kawasan transmigrasi pada Daerah Perbatasan	· Pengembangan Jalan · Pengembangan Drainase · Pengembangan Sarana Air Bersih · Pengembangan Energi Terbarukan · Pengembangan Bangunan Fasilitas Umum · Revitalisasi Rumah Transmigran · Pengembangan Jalan · Pengembangan Drainase · Pengembangan Sarana Air Bersih	120 Km 14,4 Km 3.150.000 liter - 32 Unit 700 Unit 12 Km 2 Km 787.500 Liter	483,56 Km ^{KJ} 47,84 Km ^{KJ} 13.446.361 liter ^{KJ} 71.200 Watt ^{KJ} 190 Unit ^{KJ} 1.680 Unit ^{KJ} 54 Km ^{KJ} 6,4 K ^{KJ} 2.326.430 Liter ^{KJ}	Pengembangan masyarakat dan	Kementerian Tenaga Kerja dan	226,1 14,3 16,9 10,7 27,7 51,5 28,2 1,8 2,1

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perdesaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			- Pengembangan Energi Terbarukan	-	8.152 Watt ^{K)}			1,0
			- Pengembangan Bangunan Fasilitas Umum	29 Unit	48 Unit ^{K)}			3,9
		Meningkatnya fungsi dan ketersediaan sarana prasarana di kawasan transmigrasi pada Wilayah Strategis	- Pengembangan Jalan	30 Km	120,894 Km ^{K)}			53,2
			- Pengembangan Drainase	3,6 Km	11,96 Km ^{K)}			3,6
			- Pengembangan Sarana Air Bersih	787.500 Liter	2.326.430 Liter ^{K)}			4,5
			- Pengembangan Energi Terbarukan	-	17.800 Watt ^{K)}			2,7
			- Pengembangan Bangunan Fasilitas Umum	48 Unit	88 Unit ^{K)}			7,6
c.	Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Penempatan Transmigrasi	- Tersedianya rencana pembangunan Kawasan Transmigrasi dan rencana penataan persebaran penduduk di Kawasan	- Rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Rencana Detail Pusat WPT	3 WPT	18 WPT ^{K)}	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kemen. Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Ditjen P4T	12,9
			- Rencana Kawasan Pengembangan Transmigrasi (SKP)	4 SKP	39 SKP ^{K)}			6,2
			- Rencana Teknis Permukiman/redesain tata ruang perdesaan terintegrasi dengan Kawasan Transmigrasi	13 SP	122 SP ^{K)}			22,1

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perdesaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			· Rencana Teknis Sarana dan Prasarana Permukiman Transmigrasi	2 RT SAPRAS	23 RT SARPRAS ^{KJ}			2,5
			· Rencana Teknis Pengembangan SDM dan Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	4 SKP	40 SKP ^{KJ}			3,8
			· Rencana Teknis Detail Desain Sarana dan Prasarana Pusat Kawasan Perkotaan Baru	3 DED	20 DED ^{KJ}			4,1
			· Data Potensi sasaran pengarah dan perpindahan transmigrasi	12 Kab	12 Kab			2,0
		· Tersedianya rencana pembangunan Kawasan Transmigrasi dan rencana penataan persebaran penduduk di Kawasan	· Rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Rencana Detail Pusat WPT	2 WPT	12 WPT ^{KJ}			8,6
			· Rencana Kawasan Pengembangan Transmigrasi (SKP)	3 SKP	27 SKP ^{KJ}			4,1
			· Rencana Teknis Permukiman/redesain tata ruang perdesaan terintegrasi dengan Kawasan Transmigrasi	9 SP	81 SP ^{KJ}			14,8
			· Rencana Teknis Sarana dan Prasarana Permukiman Transmigrasi	1 RT SAPRAS	14 RT SARPRAS ^{KJ}			1,6
			· Rencana Teknis Pengembangan SDM dan Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	3 SKP	28 SKP ^{KJ}			2,5

BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG

: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pembangunan Perdesaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMB AGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			- Rencana Teknis Detail Desain Sarana dan Prasarana Pusat Kawasan Perkotaan Baru	2 DED	13 DED ^{K)}			2,7
			- Data Potensi sasaran pengarah dan perpindahan transmigrasi	12 Kab	12 Kab ^{K)}			1,4
		- Tersedianya rencana pembangunan Kawasan Transmigrasi dan rencana penataan persebaran penduduk di Kawasan	- Rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Rencana Detail Pusat WPT	1 WPT	7 WPT ^{K)}			5,4
			- Rencana Kawasan Pengembangan Transmigrasi (SKP)	1 SKP	16 SKP ^{K)}			2,6
			- Rencana Teknis Permukiman/redesain tata ruang perdesaan terintegrasi dengan Kawasan Transmigrasi	5 SP	50 SP ^{K)}			9,2
			- Rencana Teknis Sarana dan Prasarana Permukiman Transmigrasi	1 RT SAPRAS	9 RT SARPRAS ^{K)}			1,0
			- Rencana Teknis Pengembangan SDM dan Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	1 SKP	16 SKP ^{K)}			1,6
			- Rencana Teknis Detail Desain Sarana dan Prasarana Pusat Kawasan Perkotaan Baru	1 DED	7 DED ^{K)}			1,7

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pembangunan Perdesaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMB AGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			- Data Potensi sasaran pengarah dan perpindahan transmigrasi	3 Kab	3 Kab			0,8
d.	Pembangunan Permukiman di Kawasan	- Termanfaatkan dan terkelolanya sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pembangunan Kawasan Transmigrasi dalam bentuk WPT atau LPT yang layak pada Daerah Tertinggal	- Lahan yang dibuka (Ha) - Jalan antar SKP, antar permukiman dan jalan lingkungan permukiman transmigrasi - Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang dibangun (Unit)	3.571 ha 7,99 km 3.926 unit	28.087 ha ^{KJ} 505,05 km ^{KJ} 24.230 unit ^{KJ}	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kemen. Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Ditjen P4T	106,3 79,6 754,9
			- Rumah penduduk setempat yang dipugar/dikembangkan (Unit)	576 unit	3.199 unit ^{KJ}			70,3
			- Fasilitas Umum/ Fasilitas Sosial yang dibangun/dikem-bangkan (Unit)	12 unit	84 unit ^{KJ}			13,8
			- Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang dibangun (Paket)	912 unit	5.098 unit ^{KJ}			19,8
			- Sarana dan Prasarana Kawasan Perkotaan Baru Yang di siapkan	9 SAPRAS	57 SARPRAS ^{KJ}			187,9
			- Luas Lahan Siap Bangun di Pusat Kawasan Perkotaan Baru	180 ha	1.140 ha ^{KJ}			2,2
		- Termanfaatkan dan terkelolanya sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pembangunan Kawasan Transmigrasi dalam bentuk WPT atau LPT yang layak pada Daerah Perbatasan	- Lahan yang dibuka (Ha) - Jalan antar SKP, antar permukiman dan jalan lingkungan permukiman transmigrasi - Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang dibangun (Unit)	2.381 ha 5,33 km 2.480 unit	18.725 ha ^{KJ} 336,71 km ^{KJ} 12.964 unit ^{KJ}	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kemen. Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Ditjen P4T	70,9 53,0 503,3

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pembangunan Perdesaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMB AGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			- Rumah penduduk setempat yang dipugar/dikembangkan (Unit)	384 unit	2.133 unit ^{K)}			46,9
			- Fasilitas Umum/ Fasilitas Sosial yang dibangun/dikembangkan (Unit)	8 unit	56 unit ^{K)}			9,2
			- Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang dibangun (Paket)	608 unit	3.399 unit ^{K)}			13,2
			- Sarana dan Prasarana Kawasan Perkotaan Baru Yang di siapkan	6 SAPRAS	36 SARPRAS ^{K)}			125,3
			- Luas Lahan Siap Bangun di Pusat Kawasan Perkotaan Baru	120 ha	760 ha ^{K)}			1,5
		- Termanfaatkan dan terkelolanya sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pembangunan Kawasan Transmigrasi dalam bentuk WPT atau LPT yang layak pada Wilayah Strategis	- Lahan yang dibuka (Ha)	3.225,6 ha	15.696,4 Ha ^{K)}	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kemen. Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Ditjen P4T	44,3
			- Jalan antar SKP dalam Kawasan Transmigrasi	0 km	64,2 km ^{K)}			3,8
			- Jalan antar Permu-kiman dalam SKP	0 km	116,8 ^{K)}			4,8
			- Jalan lingkungan dalam Permukiman (Km)	34,68 km	359,12 km ^{K)}			24,5
			- Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang dibangun (Unit)	1.448 unit	8.038 unit ^{K)}			314,5
			- Rumah penduduk setempat yang dipugar/dikembangkan (Unit)	315 unit	1.653 unit ^{K)}			29,3
			- Fasilitas Umum/ Fasilitas Sosial yang dibangun/dikembangkan (Unit)	5 unit	30 unit ^{K)}			5,7
			- Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang dibangun (Paket)	391 unit	3.008 unit ^{K)}			8,4

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perdesaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			· Sarana dan Prasarana Kawasan Perkotaan Baru Yang di siapkan	1.898 pkt	11.346 pkt ^{K)}			77,6
			· Luas Lahan Siap Bangun di Pusat Kawasan Perkotaan Baru	30 ha	182 Ha ^{K)}			1,7
VI.	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat perdesaan	Meningkatnya ketersediaan pangan dan lahan pertanian dalam rangka mempercepat pembangunan yang berkelanjutan di perdesaan termasuk di daerah transmigrasi	1. Tingkat harga produk pertanian 2. Jumlah lahan pertanian 3. Tingkat sertifikasi lahan pertanian					629,0
a.	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	· Pelayanan pengembangan usaha ekonomi masyarakat sesuai standar.	· Jumlah fasilitasi usaha di bidang pertanian dan pangan yang berada di perdesaan melalui Bintek CPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, koordinasi, serta pemberian stimulan kepada kelompok masyarakat pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD).	33 Prov. 15 Kab 6 Keg	33 Prov. 36 Kab 10 Keg	Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	20,2
b.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi	· Terciptanya pe-ningkatan kualitas dasar masyarakat di Kawasan Transmigrasi pada Daerah Tertinggal · Terciptanya pe-ningkatan kualitas dasar masyarakat di Kawasan Transmigrasi pada Daerah Perbatasan	· Bantuan Pangan · Bantuan Pangan	13.876 Kel 2.449 Kel	87.433 Kel ^{K)} 12.718 Kel ^{K)}	Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ditjen P2MKT	430,9 50,3

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perdesaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		· Terciptanya peningkatan kualitas dasar masyarakat di Kawasan Transmigrasi pada Wilayah Strategis	· Bantuan Pangan	4.082 Kel	24.964 Kel ^{K)}			127,5
VII.	Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, berwawasan mitigasi bencana	Menurunnya degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup di perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi	1. Tingkat kerusakan lingkungan 2. Tingkat pencemaran lingkungan/polusi 3. Keseserasian daya dukung alam dan daya tampung lingkungan dengan persebaran penduduk					1.217,1
a.	Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna	· Pelayanan pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai standar.	· Jumlah fasilitasi pelaksanaan pengelolaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan melalui pelatihan, rakor, supervisi, BLM dan evaluasi dengan kegiatan: (a) pemanfaatan lahan kritis sebagai pilot project DME (b) Pengelolaan Desa Hutan (c) Pengelolaan Hutan Mangrove	14 desa di 13 provinsi	20 desa di 20 provinsi 5 desa, 5 provinsi 2 desa, 2 provinsi	Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	40,5

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perdesaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			· Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan melalui identifikasi, pelatihan, bintek, rakor, BLM, dan monev (termasuk PNP-M-LMP) yang fokus kegiatannya pd penanganan lingkungan perdesaan dan mikro hydro	33 provinsi, 23 kab dan 72 kee,	33 provinsi -			190,7
			Jumlah fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana perdesaan melalui orientasi, pelatihan, koordinasi, bintek AMPL (PAMSIMAS).	33 Prov. 32 Kab	33 Prov. 10 Keg.			41,2
			· Jumlah hasil kajian dan pemetaan kebutuhan teknologi perdesaan yang diterapkan termasuk di wilayah perbatasan.	32 provinsi 50 kab. Tertinggal	32 provinsi 50 kab. Tertinggal			48,5
			· Jumlah fasilitasi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi tepat guna melalui Pelatihan, Bintek Posyantekdes, BLM, Gelar TTG, Koordinasi, dan Monev	33 Provinsi	33 Provinsi			48,3
				· 35 Kab/Kota	35 Kab/Kota			
				· 4 Pokmas	20 Pokmas ^{KS)}			
				· 20 Posyantekdes	100 ^{KS)}			
				· 8 Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	40 UMK ^{KS)}			

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pembangunan Perdesaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMB AGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
b.	Penyerasian Lingkungan di kawasan transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dalam mendukung kelestarian fungsi lingkungan hidup di kawasan transmigrasi pada Daerah Tertinggal 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan hidup di kawasan transmigrasi 	24 Dok	112 Dok ^{K)}	Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi	Kemen. Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Ditjen P2MKT	22,7
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah mitigasi lingkungan 	13 kimtrans	94 Kimtrans ^{K)}			28,3
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah fasilitasi dan advokasi penyerasian lingkungan 	5 Pkt	20 Pkt ^{K)}			2,5
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kemandirian masyarakat di permukiman transmigrasi pada Daerah Tertinggal 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah permukiman transmigrasi yang mandiri 	12 Kimtrans	132 Kimtrans ^{K)}			249,6
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Desa Mandiri Energi di kawasan Transmigrasi pada Daerah Tertinggal 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah permukiman transmigrasi yang akan berkembang menjadi Desa Mandiri Energi 	1 Kimtrans	5 Kimtrans ^{K)}			3,2
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kelestarian dan fungsi lingkungan hidup di kawasan transmigrasi pada Daerah Tertinggal 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan 	1 Dok	8 Dok ^{K)}			4,0
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Evaluasi Perkembangan Kawasan Transmigrasi 	-	44 Kws ^{K)}			4,2
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah mitigasi lingkungan 	7 Kws	22 Kws ^{K)}			11,1
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dalam mendukung kelestarian fungsi lingkungan hidup di kawasan transmigrasi pada Daerah Perbatasan 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan hidup di kawasan transmigrasi 	4 Dok	26 Dok ^{K)}			3,0
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kemandirian masyarakat di permukiman transmigrasi pada Daerah Perbatasan 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah mitigasi lingkungan 	2 Kimtrans	16 Kimtrans ^{K)}			4,0
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah fasilitasi dan advokasi penyerasian lingkungan 	1 Pkt	5 Pkt ^{K)}			0,5
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah permukiman transmigrasi yang mandiri 	2 Kimtrans	21 Kimtrans ^{K)}			36,9

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pembangunan Perdesaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMB AGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		■ Meningkatnya Desa Mandiri Energi dikawasan Transmigrasi pada Daerah Perbatasan	■ Jumlah permukiman transmigrasi yang akan berkembang menjadi Desa Mandiri Energi	1 Kimtrans	5 Kimtrans ^{K)}			3,2
		■ Meningkatnya kelestarian dan fungsi lingkungan hidup di kawasan transmigrasi pada Daerah Perbatasan	■ Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan	1 Dok	5 Dok ^{K)}			2,5
			■ Jumlah Evaluasi terhadap Perkembangan Kawasan Transmigrasi	-	12 Kws ^{K)}			1,2
			■ Jumlah mitigasi lingkungan	2 Kws	9 Kws ^{K)}			4,5
		■ Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dalam mendukung kelestarian fungsi lingkungan hidup di kawasan transmigrasi pada Wilayah	■ Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan hidup di kawasan transmigrasi	6 Dok	28 Dok ^{K)}			5,7
			■ Jumlah mitigasi lingkungan	3 Kimtrans	25 Kimtrans ^{K)}			8,3
		■ Meningkatnya kemandirian masyarakat di permukiman transmigrasi pada Wilayah Strategis	■ Jumlah permukiman transmigrasi yang mandiri	4 Kimtrans	38 Kimtrans ^{K)}			57,5
		■ Meningkatnya kelestarian dan fungsi lingkungan hidup di kawasan transmigrasi pada Wilayah Strategis	■ Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan	1 Dok	12 Dok ^{K)}			6,0
			· Jumlah Evaluasi terhadap Perkembangan Kawasan Transmigrasi	-	12 Kws ^{K)}			1,2
			· Jumlah mitigasi lingkungan	1 Kws	9 Kws ^{K)}			5,9

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pembangunan Perdesaan**

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMB AGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)		
				2010	2014					
c.	Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi	- Terwujudnya persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup di Kawasan Transmigrasi pada Daerah Tertinggal	- Jumlah keluarga yang difasilitasi perpindahannya ke Kawasan Transmigrasi	3.926 kel	21.230 kel ^{K)}	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kemen. Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Ditjen P4T	105,4		
			- Jumlah keluarga penduduk yang tertata terintegrasi dalam Kawasan Transmigrasi	11.615 kel	63.527 kel ^{K)}			6,3		
			- Data administrasi kependudukan masyarakat di Kawasan Transmigrasi	3.926 kel	21.230 kel ^{K)}			2,0		
			- Jumlah bantuan perbekalan yang diberikan kepada calon transmigran	3.926 kel	21.230 kel ^{K)}			48,2		
			- Jumlah fasilitasi pelatihan calon transmigran	131 Aktn	708 Aktn ^{K)}			21,4		
		- Terwujudnya persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup di Kawasan Transmigrasi pada Daerah Perbatasan	- Jumlah keluarga yang difasilitasi perpindahannya ke Kawasan Transmigrasi	2.617 kel	14.153 kel ^{K)}			Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kemen. Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Ditjen P4T	70,3
			- Jumlah keluarga penduduk yang tertata terintegrasi dalam Kawasan Transmigrasi	7.744 kel	42.352 kel ^{K)}					4,2
			- Data administrasi kependudukan masyarakat di Kawasan Transmigrasi	2.617 kel	14.153 kel ^{K)}					1,3
			- Jumlah bantuan perbekalan yang diberikan kepada calon transmigran	2.617 kel	14.149 kel ^{K)}					32,2
			- Jumlah fasilitasi pelatihan calon transmigran	87 Aktn	472 Aktn ^{K)}					14,3

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pembangunan Perdesaan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		· Terwujudnya persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup di Kawasan Transmigrasi pada Wilayah Strategis	· Jumlah keluarga yang difasilitasi perpindahannya ke Kawasan Transmigrasi	1.640 kel	8.850 kel ^{K)}	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kemen. Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Ditjen P4T	43,9
	· Jumlah keluarga penduduk yang tertata terintegrasi dalam Kawasan Transmigrasi		5.141 kel	26.771 kel ^{K)}	2,6			
	· Data administrasi kependudukan masyarakat di Kawasan Transmigrasi		1.640 kel	8.850 kel ^{K)}	0,8			
	· Jumlah bantuan perbekalan yang diberikan kepada calon transmigran		1.640 kel	8.850 kel ^{K)}	20,1			
	· Jumlah fasilitasi pelatihan calon transmigran		52 Aktn	291 Aktn ^{K)}	9,0			
TOTAL								56.579,4

Keterangan :

^{K)} Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG

: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	PENINGKATAN TATA KELOLA EKONOMI DAERAH	Kondusifnya iklim investasi dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah.	1. Meningkatnya Indeks Kinerja Ekonomi Daerah	60	62			267,3
			2. Meningkatnya Indeks Komitmen Pemerintah Provinsi	63,1	65,1			
			3. Meningkatnya Indeks Kelembagaan Penanaman Modal	53,2	55,2			
			4. Meningkatnya Indeks Akses Lahan Usaha	60,5	62,5			
			5. Meningkatnya Indeks Kondisi Keamanan Usaha	55,5	57,5			
			6. Meningkatnya Indeks Iklim Investasi Daerah	61	63			
			7. Meningkatnya Indeks Promosi Investasi Daerah	54	60			
a	Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah	Tersusunnya regulasi/kebijakan pengembangan ekonomi lokal dan daerah terkait dengan optimalisasi Potensi, Promosi, Sarana dan Prasarana, Kerjasama serta Kelembagaan Ekonomi Daerah	Jumlah regulasi/kebijakan yang disusun dan disahkan, terkait dengan optimalisasi potensi, promosi, sarana dan prasarana, kerjasama serta kelembagaan ekonomi daerah.	1 pkt	5 pkt ^{K)}	Program Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri	7,5

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah**

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		Berkembangnya lembaga usaha ekonomi daerah, terutama di bidang permodalan dan perizinan usaha	Jumlah SOP/institusi/Unit Pelayanan Terpadu (UPT) untuk pelaksanaan OSS (One Stop Services), termasuk di kawasan perkotaan baru di kawasan transmigrasi, agropolitan /minapolitan, kawasan sentra produksi, klaster industri, dan kawasan khusus lainnya.	1 pkt	5 pkt ^{K)}			9,4
		Tersedianya data dan informasi tentang terkait dengan potensi, sarana dan prasarana, kerjasama dan kelembagaan ekonomi daerah	Tersedianya data dan info terkait dengan Potensi, Promosi, Sarana, Kerjasama dan Kelembagaan Ekonomi Daerah.	1 pkt	5 pkt			7,0

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah**

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Terlaksananya desiminasi/sosialisasi hasil pengembangan data dan info terkait dengan potensi, promosi, sarana dan prasarana, kerjasama serta kelembagaan ekonomi daerah	1 pkt	5 pkt			11,0
		Terfasilitasinya Daerah dalam memecahkan permasalahan implementasi kebijakan yang terkait dengan Potensi, Promosi, Sarana dan Prasarana, Kerjasama serta Kelembagaan Ekonomi Daerah	Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam upaya memecahkan permasalahan implementasi kebijakan yang terkait dengan Potensi, Promosi, Sarana dan Prasarana, Kerjasama serta Kelembagaan Ekonomi Daerah	15 prov/kab/ kota	25 prov/kab/kota			10,5
		Mempercepat proses perijinan di daerah	Jumlah daerah yang membentuk PTSP	5%	70%			113,8
			PTSP yang menerapkan SPIPISE	5%	60%			
			Pembatalan perda bermasalah	100%	100%			
			Daerah yang mengurangi biaya untuk berusaha	30%	70%			

BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG

: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
b.	Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Trans-migrasi dan regu-lasi yang mendukung pengembangan kawasan transmigrasi sebagai kawasan Perkotaan Baru di kawasan tertinggal 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah MasterPlan, ActionPlan, dan Business Plan Wilayah Pembangunan Transmigrasi (WPT) di kawasan tertinggal 	1 Kws	5 Kws ^{K)}	Program Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3,9
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Prosentase MasterPlan, Action Plan, dan Business Plan Wilayah Pembangunan Transmigrasi (WPT) yang disahkan di kawasan tertinggal 	100%	100%			40,8
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah SDM Aparatur yang mampu mengelola kawasan perkotaan baru/KTM di kawasan tertinggal 	70 org	545 org ^{K)}				
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Trans-migrasi dan regu-lasi yang mendukung pengembangan kawasan transmigrasi sebagai kawasan Perkotaan Baru di kawasan perbatasan 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah MasterPlan, ActionPlan, dan Business Plan Wilayah Pembangunan Transmigrasi (WPT) di kawasan perbatasan 	1 Kws	5 Kws ^{K)}	Program Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3,9

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah**

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Prosentase MasterPlan, Action Plan, dan Business Plan Wilayah Pembangunan Transmigrasi (WPT) yang disahkan di kawasan perbatasan 	100,00%	100,00%			
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah SDM Aparatur yang mampu mengelola kawasan perkotaan baru/KTM di kawasan perbatasan 	15 org	65 org ^{k)}			4,0
c.	Pengembangan Usaha Ekonomi di kawasan transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Berkembangnya lembaga usaha ekonomi daerah, terutama di bidang permodalan dan perizinan usaha, di kawasan transmigrasi di kawasan tertinggal 	<ul style="list-style-type: none"> · Jumlah lembaga 	2 Kws	9 Kws ^{k)}	Program Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3,6
			<ul style="list-style-type: none"> · Perbankan/keuangan di kawasan transmigrasi di kawasan tertinggal 					
			<ul style="list-style-type: none"> · Jumlah koperasi di kawasan tertinggal 	2 unit	9 unit ^{k)}			5,4

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah**

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Berkembangnya lembaga usaha ekonomi daerah, terutama di bidang permodalan dan perizinan usaha, di kawasan transmigrasi di kawasan perbatasan 	- Jumlah lembaga Perbankan/keuangan di kawasan transmigrasi di kawasan perbatasan	1 Kws	5 Kws ^{K)}	Program Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2,0
			- Jumlah koperasi di kawasan perbatasan	2 unit	5 unit ^{K)}			4,2
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Berkembangnya lembaga usaha ekonomi daerah, terutama di bidang permodalan dan perizinan usaha, di kawasan transmigrasi di kawasan strategis 	- Jumlah lembaga Perbankan/keuangan di kawasan strategis	1 unit	5 unit ^{K)}	Program Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2,5
			- Jumlah koperasi di kawasan strategis	1 unit	5 unit ^{K)}			6,0
d.	Penelitian dan Pengembangan untuk Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan untuk pengembangan masyarakat dan Kawasan Transmigrasi yang dijadikan rekomendasi/ kebijakan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan untuk Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi yang dijadikan rekomendasi/ kebijakan	8 Keg	68 Keg ^{K)}	Program Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	73,8
e.	Pengelolaan data dan informasi kawasan transmigrasi	Tersedianya data dan informasi kawasan transmigrasi	Jumlah data dan informasi kawasan transmigrasi	5	25 ^{K)}	Program Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	71,8

BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG

: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
II	PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENGELOLA EKONOMI DAERAH	Meningkatnya kemandirian dan keberlanjutan program/ kegiatan pengembangan ekonomi daerah, terutama di daerah	1. Meningkatnya Indeks Tenaga Kerja	63,4	65,4			75,1
a	Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah	Terlaksananya peningkatan wawasan aparatur dalam bidang pengembangan ekonomi lokal dan daerah.	Jumlah workshop Diseminasi/ studi Banding mengenai pengembangan ekonomi lokal dan daerah.	1 pkt	5 pkt ^{k)}	Program Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri	12,5
		Terbentuknya forum lintas stakeholder terkait perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pengembangan ekonomi lokal dan daerah	Jumlah forum lintas stakeholder yang aktif	1 pkt	5 pkt ^{k)}			7,8
b.	Peningkatan Kapasitas SDM dan Masyarakat di kawasan transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di Kawasan Tertinggal 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah pelatihan /Bintek/ Diseminasi/ studi Banding mengenai pengembangan ekonomi lokal dan daerah untuk aparatur pengelola kawasan transmigrasi di Kawasan Tertinggal 	3 kali	12 kali ^{k)}	Program Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	7,0
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Terlaksananya pelatihan BDS bagi masyarakat dan pengusaha lokal/ daerah di kawasan transmigrasi di Kawasan Tertinggal 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah pelatihan BDS bagi masyarakat dan pengusaha lokal/daerah di kawasan transmigrasi di Kawasan Tertinggal 	3 kali	16 kali ^{k)}			11,3

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah**

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Terbentuknya forum lintas stakeholder terkait perencanaan dan penganggaran program/ kegiatan pengembangan ekonomi lokal dan daerah di kawasan atrasmigrasi di Kawasan Tertinggal 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah forum lintas stakeholder yang aktif di Kawasan Tertinggal ■ % jumlah stakeholder non pemerintah yang terlibat di dalam forum lintas stakeholder di Kawasan Tertinggal 	5	43 ^{K)}			12,9
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di Kawasan Perbatasan 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah pelatihan /Bintek/ Diseminasi/ studi Banding mengenai pengembangan ekonomi lokal dan daerah untuk aparaturnya pengelola kawasan transmigrasi di Kawasan Perbatasan 	1 kali	5 kali ^{K)}			3,5
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Terlaksananya pelatihan BDS bagi masyarakat dan pengusaha lokal/ daerah di kawasan transmigrasi di Kawasan Perbatasan 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah pelatihan BDS bagi masyarakat dan pengusaha lokal/daerah di kawasan transmigrasi di Kawasan Perbatasan 	1 kali	5 kali ^{K)}			3,5

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah**

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		<ul style="list-style-type: none"> Terbentuknya forum lintas stakeholder terkait perencanaan dan penganggaran program/ kegiatan pengembangan ekonomi lokal dan daerah di kawasan transmigrasi di Kawasan Perbatasan 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah forum lintas stakeholder yang aktif di Kawasan Perbatasan % jumlah stakeholder non pemerintah yang terlibat di dalam forum lintas stakeholder di Kawasan Perbatasan 	1	11 ^{K)}			3,3
		<ul style="list-style-type: none"> Meningktanya partisipasi masyarakat dalam pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di Kawasan Strategis 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pelatihan /Bintek/ Diseminasi/ studi Banding mengenai pengembangan ekonomi lokal dan daerah untuk aparatur pengelola kawasan transmigrasi di Kawasan Strategis 	1 Kali	5 kali ^{K)}			6,5
		<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya pelatihan BDS bagi masyarakat dan pengusaha lokal/daerah di kawasan transmigrasi di Kawasan Strategis 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pelatihan BDS bagi masyarakat dan pengusaha lokal/daerah di kawasan transmigrasi di Kawasan Strategis 	1 Kali	5 kali ^{K)}			3,5

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah**

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Terbentuknya forum lintas stakeholder terkait perencanaan dan penganggaran program/ kegiatan pengembangan ekonomi lokal dan daerah di kawasan transmigrasi di Kawasan Strategis 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah forum lintas stakeholder yang aktif di Kawasan Strategis ■ % jumlah stakeholder non pemerintah yang terlibat di dalam forum lintas stakeholder di Kawasan Strategis 	2 Forum	11 Forum ^{K)}			3,3
				20%	50%			
C.	Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu	Terwujudnya optimalisasi pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau kecil dan kawasan strategis dan cepat tumbuh	% pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan terkait dengan PNPM PISEW di 9 provinsi	20%	90%	Program Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri	50,5
III	PENINGKATAN FASILITASI/ PENDAMPINGAN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN DAERAH	Terintegrasinya sumber daya dari berbagai stakeholder (pemerintah, dunia usaha, dan akademisi) dalam upaya fasilitasi pengembangan ekonomi lokal dan daerah.	Terbentuknya lembaga fasilitasi pengembangan ekonomi lokal dan daerah (LRED Support Facility)	1 pkt	5 pkt ^{K)}			98,3
a.	Perencanaan pembangunan bidang perkotaan dan perdesaan (pengembangan ekonomi lokal dan daerah)	Terlaksananya penyusunan kebijakan pelaksanaan dan perencanaan pengembangan ekonomi lokal dan daerah	Tersusunnya kebijakan pengembangan ekonomi lokal dan daerah	1 pkt	5 pkt ^{K)}	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	Kemeneq PPN	2,5
			Terbentuknya Forum Koordinasi Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah	1 pkt	5 pkt ^{K)}			2,9

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah**

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		Terintegrasinya sumber daya dari berbagai stakeholder (pemerintah, dunia usaha, dan akademisi) dalam upaya fasilitasi pengembangan ekonomi lokal dan daerah.	Terbentuknya lembaga fasilitasi pengembangan ekonomi lokal (LRED Support Facility) di tingkat pusat.	1 pkt	5 pkt ^{K)}			2,5
b	Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya ketersediaan tenaga fasilitasi dan jangka waktu fasilitasi kepada pelaku usaha ekonomi daerah mengenai kualitas produksi, pengolahan dan pemasaran	§ Jumlah tenaga fasilitator, baik di pusat maupun daerah, termasuk di kawasan transmigrasi, agropolitan/minapolitan, kawasan sentra produksi, klaster industri, dan kawasan strategis lainnya	1 pkt	5 pkt ^{K)}	Program Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri	5,8
			§ Jumlah lembaga fasilitasi di daerah	1 unit	5 unit ^{K)}			2,8
			§ Jangka waktu penyelenggaraan fasilitasi di daerah, termasuk di kawasan transmigrasi, agropolitan/minapolitan, kawasan sentra produksi, klaster industri dan kawasan strategi lainnya.	10 bln	10 bln			

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah**

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
c	Pengembangan Usaha Ekonomi di kawasan transmigrasi	Meningkatnya fasilitasi pengembangan usaha ekonomi kawasan transmigrasi sebagai kawasan perkotaan baru di Kawasan Tertinggal	■ Jumlah tenaga fasilitator di kawasan transmigrasi di Kawasan Tertinggal	328 org	1983 org ^{K)}	Program Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	12,2
			■ Jangka waktu penyelenggaraan fasilitasi di kawasan transmigrasi di Kawasan Tertinggal	12 Bln	60 Bln ^{K)}			
			■ Jumlah pendampingan Pengembangan Usaha Ekonomi Kawasan di Kawasan Tertinggal	3 Unit	15 unit ^{K)}			
			■ Agrocenter di Kawasan Tertinggal	-	10 Kws ^{K)}			20,0
			■ Pengembangan Investasi swasta di Kawasan Tertinggal	2 Kws	13 Kws ^{K)}			13,0
			■ Jumlah Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) di Kawasan Tertinggal	2 Kws	11 Kws ^{K)}			5,0

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah**

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		Meningkatnya fasilitasi pengembangan usaha ekonomi kawasan transmigrasi sebagai kawasan perkotaan baru di Kawasan Perbatasan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah tenaga fasilitator di kawasan transmigrasi di Kawasan Perbatasan 	80 org	425 org ^{K)}			2,8
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jangka waktu penyelenggaraan fasilitasi di kawasan transmigrasi di Kawasan Perbatasan 	12 Bln	60 Bln ^{K)}			
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah pendampingan Pengembangan Usaha Ekonomi Kawasan di Kawasan Perbatasan 	1 Unit	5 unit ^{K)}			
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Agrocenter di Kawasan Perbatasan 	-	4 Kws ^{K)}			8,0
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Pengembangan Investasi swasta di Kawasan Perbatasan 	1 Kws	5 Kws ^{K)}			5,0
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) di Kawasan Perbatasan 	1 Kws	5 Kws ^{K)}			2,5
		Meningkatnya fasilitasi pengembangan usaha ekonomi kawasan transmigrasi sebagai kawasan perkotaan baru di Kawasan Strategis	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jumlah tenaga fasilitator di kawasan transmigrasi di Kawasan Strategis 	146 org	699 org ^{K)}			4,4

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah**

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Jangka waktu penyelenggaraan fasilitasi di kawasan transmigrasi di Kawasan Strategis ■ Jumlah pendampingan Pengembangan Usaha Ekonomi Kawasan di Kawasan Strategis ■ Agrocenter di Kawasan Strategis ■ Jumlah Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) di Kawasan Strategis 	12 Bln	60 Bln ^{K)}			
				4 Unit	20 Unit ^{K)}			6,0
				1 Kws	3 Kws ^{K)}			3,0
				1 Kws	3 Kws ^{K)}			
IV	PENINGKATAN KERJASAMA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN DAERAH	Meningkatnya hubungan kerjasama antar daerah dan kemitraan pemerintah-swasta dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal dan daerah.	1. Meningkatnya jumlah KAD 2. Meningkatnya Indeks Peranan Dunia Usaha dalam Perekonomian Daerah	42	62			42,1
a	Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya kualitas kerja sama antar daerah dan kemitraan pemerintah swasta dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal dan daerah	Jumlah forum kerjasama antar daerah/wilayah	-	1 pkt evaluasi hasil kinerja forum kerjasama/kemitraan	Program Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri	6,3

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah**

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			Jumlah sektor / bidang ekonomi yang dikerjasamakan	-	1 pkt evaluasi hasil kerjasama kemitraan dibid eklok antar daerah/ swasta			6,6
			Jumlah MoU PPP	-	1 pkt evaluasi potensi eklok yang dapat di kerjasamakan.			5,4
			-	Optimalisasi pelaksanaan kerjasama dlm rangka mendorong pengembangan eklok dan daerah (Care, Plan, CHF dan AusAID)	Evaluasi hasil kerjasama pengembangan eklok dan daerah (Care, Plan, CHF dan AusAID)			4,1

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah**

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		Meningkatnya kualitas kerja sama antar daerah dan kemitraan pemerintah swasta dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal dan daerah	Jumlah forum kerjasama antar daerah/wilayah	-	1 pkt evaluasi hasil kinerja forum kerjasama/kemitraan			6,3
			-	Finalisasi pedum pengembangan model kerjasama ekonomi daerah	Evaluasi pelaksanaan pedum pengembangan model kerjasama ekonomi daerah			2,1
			-	Penyusunan instrumen kerjasama ekonomi daerah	Evaluasi pelaksanaan instrumen kerjasama ekonomi daerah			2,3

**BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG**

**: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah**

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
b.	Pengembangan Usaha Ekonomi di kawasan transmigrasi	Meningkatnya kualitas kerja sama antar daerah dan kemitraan pemerintah swasta dalam mendukung pengembangan ekonomi kawasan di Kawasan Tertinggal	■ jumlah forum kerja sama antar daerah/wilayah di Kawasan Tertinggal	3 Forum	16 Forum ^{K)}	Program Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	5,2
			■ jumlah sektor/bidang ekonomi yang dikerjasamakan di Kawasan Tertinggal	3 Sektor	16 Forum ^{K)}			
			■ Jumlah MoU sektor terkait di Kawasan Tertinggal	3	16 ^{K)}			
		Meningkatnya kualitas kerja sama antar daerah dan kemitraan pemerintah swasta dalam mendukung pengembangan ekonomi kawasan di Kawasan Perbatasan	■ jumlah forum kerja sama antar daerah/wilayah di Kawasan Perbatasan	1 Forum	5 Forum ^{K)}			2,0
			■ jumlah sektor/bidang ekonomi yang dikerjasamakan di Kawasan Perbatasan	1 Sektor	5 Sektor ^{K)}			
			■ Jumlah MoU sektor terkait di Kawasan Perbatasan	1	5 ^{K)}			

BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG

: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
		Meningkatnya kualitas kerja sama antar daerah dan kemitraan pemerintah swasta dalam mendukung pengembangan ekonomi kawasan di Kawasan Strategis	<ul style="list-style-type: none"> ■ jumlah forum kerja sama antar daerah/wilayah di Kawasan Strategis ■ jumlah sektor/ bidang ekonomi yang dikerja samakan di Kawasan Strategis ■ Jumlah MoU sektor terkait di Kawasan Strategis 	2	7 ^{k)}			1,8
V	PENINGKATAN AKSES TERHADAP SARANA DAN PRASARANA FISIK PENDUKUNG KEGIATAN EKONOMI LOKAL DAN DAERAH.	Meningkatnya akses terhadap sarana dan prasarana fisik pendukung kegiatan ekonomi lokal dan daerah	Meningkatnya Indeks Infrastruktur	55,8	57,8			2.508,7
a.	Pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi	Meningkatnya akses terhadap sarana dan prasarana kawasan transmigrasi di Kawasan Tertinggal	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pengembangan jalan ■ Pengembangan drainase 	9.2 km	62.65 km ^{k)}	Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi	Kemen. Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	96,4
				13 km	47 km ^{k)}			24,0

BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG

: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)	
				2010	2014				
			■ Pengembangan Sarana Air Bersih	5.555.556 liter	24042735 liter ^{K)}			37,0	
			■ Pengembangan Energi Terbarukan	176.457 watt	486.906 watt ^{K)}			80,5	
			■ Pengembangan Fasilitas Umum	3 unit	56 unit ^{K)}			116,9	
		Meningkatnya akses terhadap sarana dan prasarana kawasan transmigrasi di Kecamatan Bontotene	■ Pengembangan jalan	4 km	10.1 km ^{K)}			8,8	
			■ Pengembangan drainase	-	7 km ^{K)}			3,0	
			■ Pengembangan Sarana Air Bersih	-	3.333.334 liter ^{K)}			4,1	
			■ Pengembangan Energi Terbarukan	-	23.810 watt ^{K)}			3,5	
			■ Pengembangan Fasilitas Umum	3 unit	11 unit ^{K)}			7,1	
			Meningkatnya akses terhadap sarana dan prasarana kawasan transmigrasi di Kecamatan Bontotene	■ Pengembangan jalan	21,38 km	36.28 km ^{K)}			19,7
				■ Pengembangan drainase	-	9 km ^{K)}			3,8
		■ Pengembangan Sarana Air Bersih		-	3.333.334 liter ^{K)}			5,3	
		■ Pengembangan Energi Terbarukan		-	23.810 watt ^{K)}			3,5	

BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG

: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
			■ Pengembangan Fasilitas Umum	6 unit	26 unit ^{K)}			30,2
b.	Penyelenggaraan Pengembangan Permukiman	Tertanganinya kawasan-kawasan pusat pertumbuhan di perdesaan termasuk agropolitan	Jumlah kawasan perdesaan potensial / agropolitan yang tertangani	55 kws	205 kws ^{K)}	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian Pekerjaan Umum	780,0
		Terbangunnya kawasan yang didukung oleh infrastruktur ekonomi dan sosial wilayah	Jumlah kawasan agropolitan yang dilayani oleh infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial	50 kws	185 kws ^{K)}			1.285,0
TOTAL								2.991,5

Keterangan :

^{K)} Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG

: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pengembangan Kawasan Strategis

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Pembentukan dan Pengembangan termasuk peningkatan pembinaan, pengawasan, dan pengusahaan Kelembagaan pengelola KAPET, KPBPB, KEK dan kawasan strategis cepat tumbuh lainnya	Berkembangnya dan meningkatnya pengelolaan dan pengusahaan kawasan melalui lembaga yang terpadu, dukungan pendanaan dan kejelasan regulasi	Persentase peningkatan Kinerja kelembagaan pengelolaan dan pengusahaan kawasan	60%	100%			429,5
a	Pengembangan Kawasan dan Otorita	Meningkatnya pengembangan kawasan dan otorita di daerah	Persentase fasilitasi kawasan otorita, kawasan industri dan perdagangan bebas, dan kawasan kepentingan umum yang dikelola dan dikembangkan	65%	90%	Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Kemendagri	105,8
b.	Pengembangan wilayah terpadu	Terlaksananya koordinasi pengelolaan dan pengembangan kawasan	Persentase daerah yang menerapkan pedoman/kebijakan terkait dengan pengembangan potensi perekonomian daerah	50%	100%	Pembangunan Daerah	Kemendagri	323,7
TOTAL								429,5

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Pengembangan Kawasan Perbatasan

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan	Meningkatnya kegiatan perekonomian ekonomi kab/kota perbatasan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	Presentase kab/kota di kawasan perbatasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi setiap tahun sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi	20%	100%			24,5
a	Pengembangan wilayah terpadu	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan hasil pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil	Jumlah pedoman/kebijakan terkait dengan pengembangan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil	1	1	Program Bina Pembangunan Daerah	Kemendagri	24,5
			Persentase wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil, yang mengimplementasikan pedoman/kebijakan terkait dengan pengembangan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil	20%	90%			

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan	Meningkatnya kegiatan perekonomian ekonomi kab/kota perbatasan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	Presentase kab/kota di kawasan perbatasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi setiap tahun sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi	20%	100%			24,5
a	Pengembangan wilayah terpadu	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan hasil pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Perbatasan	Jumlah pedoman/kebijakan terkait dengan pengembangan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil Persentase terfasilitasinya wilayah perbatasan untuk mendorong pertumbuhan Ekonomi.	1 5%	1 100%	Program Bina Pembangunan Daerah	Kemendagri	24,5
II	Penguatan kapasitas kelembagaan dalam upaya pengembangan kawasan perbatasan secara terintegrasi	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam pengembangan kawasan perbatasan beserta infrastruktur penunjangnya	Persentase Kab/Kota perbatasan yang telah memiliki pengaturan kelembagaan dalam pengembangan kawasan perbatasan secara terintegrasi	20%	100%			1.124,2

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan	Meningkatnya kegiatan perekonomian ekonomi kab/kota perbatasan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	Presentase kab/kota di kawasan perbatasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi setiap tahun sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi	20%	100%			24,5
a	Pengembangan wilayah terpadu	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan hasil pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil	Jumlah pedoman/kebijakan terkait dengan pengembangan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil	1	1	Program Bina Pembangunan Daerah	Kemendagri	24,5
			Presentase PKSN dan kecamatan perbatasan dengan infrastruktur penunjang pelayanan pemerintahan sesuai kebutuhan	20%	100%			
			Persentase kab/kota di perbatasan yang tergolong wilayah tertinggal dengan indeks ketertinggalan yang semakin membaik	20%	100%			

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan	Meningkatnya kegiatan perekonomian kab/kota perbatasan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	Presentase kab/kota di kawasan perbatasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi setiap tahun sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi	20%	100%			24,5
a	Pengembangan wilayah terpadu	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan hasil pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil	Jumlah pedoman/kebijakan terkait dengan pengembangan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil	1	1	Program Bina Pembangunan Daerah	Kemendagri	24,5
a	Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan	Meningkatnya kemampuan pengelolaan Pos Lintas Batas (PLB) internasional dan tradisional secara terpadu yang telah disepakati antar negara	Jumlah Pos lintas Batas tradisional dan internasional dengan kualitas manajemen pengelolaan serta fasilitas pendukung yang memadai	3	3	Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Kemendagri	977,2
		Terfasilitasnya penguatan kelembagaan wilayah perbatasan antar negara	Presentase penguatan kelembagaan di pusat dan daerah dalam rangka penanganan perbatasan antar negara.	25%	100%			

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan	Meningkatnya kegiatan perekonomian ekonomi kab/kota perbatasan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	Presentase kab/kota di kawasan perbatasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi setiap tahun sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi	20%	100%			24,5
a	Pengembangan wilayah terpadu	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan hasil pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil Meningkatnya sarpras perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar dalam rangka pelayanan umum pemerintahan Meningkatnya kerjasama perbatasan antar negara (SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG)	Jumlah pedoman/kebijakan terkait dengan pengembangan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil Presentase jumlah kab/kota di wilayah perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar yang mendapat sarpras perbatasan antar negara Jumlah provinsi yang termasuk ke dalam perbatasan antar negara (SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG)	1 25% 6	1 100% 6	Program Bina Pembangunan Daerah	Kemendagri	24,5

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan	Meningkatnya kegiatan perekonomian ekonomi kab/kota perbatasan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	Presentase kab/kota di kawasan perbatasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi setiap tahun sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi	20%	100%			24,5
a.	Pengembangan wilayah terpadu	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan hasil pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil	Jumlah pedoman/kebijakan terkait dengan pengembangan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil	1	1	Program Bina Pembangunan Daerah	Kemendagri	24,5
b.	Pengembangan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi daerah tertinggal di kawasan perbatasan	Meningkatnya koordinasi antar sektor dalam pengembangan daerah tertinggal di kawasan perbatasan	Jumlah rencana aksi pengembangan daerah tertinggal di kawasan perbatasan yang dikoordinasikan	27	27	Program Percepatan Pengembangan Ekonomi Daerah Tertinggal	KPDT	147,0
TOTAL								1.148,7

BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG

: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Pengembangan Pembangunan Daerah Tertinggal

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Pengembangan ekonomi lokal	Peningkatan rata-rata PDRB Perkapita Non Migas di daerah tertinggal Berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	Rata-rata PDRB Perkapita Non Migas di daerah tertinggal rata-rata persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	9,2 Jt 18.8%	11,6Jt 14.2%			1.267,2

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
a	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pusat produksi daerah tertinggal	1. Meningkatnya pengembangan pusat produksi di daerah tertinggal 2. Terfasilitasinya pemulihan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, dengan menciptakan dan memberdayakan lingkungan pendukung bagi perbaikan kegiatan usaha dan pembangunan manusia	1. Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang memiliki pusat produksi 2. (a). meningkatkan kemampuan dan keberdayaan petani skala kecil dan aparat pemerintah untuk mendukung kegiatan usaha berbasis kelompok di perdesaan, (b). Melaksanakan kegiatan perbaikan usaha pertanian dan usaha lainnya, (c). Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan belanja publik, manajemen pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program.	20%	100%	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	KPDT	309,6

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
b.	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal	1. Meningkatnya pengembangan pusat pertumbuhan di Daerah Tertinggal 2. Terfasilitasinya pembiayaan untuk pengembangan ekonomi	1. Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang memiliki Pusat Pertumbuhan 2. Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan untuk pengembangan ekonomi melalui (a) Berkembangnya sektor usaha swasta berorientasi pasar, (b) meningkatnya kualitas dan nilai tambah produksi pertanian, perikanan, dan perkebunan, (c). Meningkatkan perdagangan internasional, dan (d). Meningkatkan investasi dalam negeri maupun luar negeri	20%	100%	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	KPDT	676,6
c	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi usaha mikro kecil menengah dan koperasi daerah tertinggal	Meningkatnya pengembangan usaha mikro kecil menengah dan koperasi di daerah tertinggal	Persentase daerah tertinggal yang mengembangkan usaha mikro kecil menengah dan koperasi di daerah tertinggal	20%	100%	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	KPDT	93,0

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
d	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pendanaan dan kemitraan usaha daerah tertinggal	Meningkatnya ketersediaan sumber pendanaan dan pengembangan kemitraan usaha di daerah tertinggal	Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang telah memiliki sumber pendanaan dan melaksanakan kemitraan usaha dengan daerah lain.	20%	100%	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	KPDT	92,0
e	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi investasi ekonomi daerah daerah tertinggal	Meningkatnya jumlah dan nilai investasi di daerah tertinggal	Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang telah meningkatkan jumlah dan nilai investasi	20%	100%	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	KPDT	96,0
II	Penguatan kelembagaan masyarakat dan pmda dalam pengelolaan sumberdaya lokal	Meningkatnya PAD di kabupaten daerah tertinggal	Rata-rata Laju peningkatan PAD di kabupaten daerah tertinggal					1.630,1
a	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pelatihan masyarakat	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan	Jumlah daerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi peningkatan kelembagaan dan pelatihan masyarakat (provinsi)	32	32	Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	Kemendagri	63,0

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
b	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan pemerintah daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik.	1. Meningkatnya kemampuan sistem, organisasi, dan SDM pemerintahan daerah untuk mewujudkan good governance 2. (i) Meningkatnya kemampuan kelembagaan Pemda dan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lokal, (ii) Meningkatnya kegiatan ekonomi, pengembangan sumberdaya manusia, dan infrastruktur lingkungan perdesaan secara terpadu di daerah tertinggal, dan (iii) Meningkatkan mobilitas penduduk dan arus barang antara daerah tertinggal ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik, melalui PNPB Mandiri	1. Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan kelembagaan pemerintah daerah dan mengalami peningkatan indeks good governance 2. (i) Persentase jumlah kabupaten tertinggal yang kemampuan kelembagaan pembangunan masyarakat dan pemda meningkat dalam pengelolaan sumberdaya lokal, (ii) Persentase jumlah kawasan pembangunan perdesaan yang terpadu dari aspek ekonomi, sumberdaya manusia, dan infratraktur lingkungan, dan (iii) Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang mengalami peningkatan mobilitas penduduk dan arus barang antara daerah tertinggal ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik	20%	100%	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	KPDT	1.227,5
				64%	100%			

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
c	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan sosial masyarakat daerah tertinggal	Meningkatnya kapasitas kelembagaan sosial masyarakat daerah tertinggal	Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan kelembagaan sosial masyarakat daerah tertinggal	20%	100%	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	KPDT	89,0
d	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi lembaga kerjasama antar daerah daerah tertinggal	Meningkatnya kerjasama antar lembaga pemerintah di daerah tertinggal	persentase kabupaten daerah tertinggal yang menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah lain.	20%	100%	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	KPDT	85,0
e	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi lembaga perekonomian daerah tertinggal	Meningkatnya kapasitas lembaga perekonomian daerah tertinggal	persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan lembaga perekonomian di daerah tertinggal	20%	100%	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	KPDT	77,0
f	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi kemitraan antar lembaga daerah daerah tertinggal	Meningkatnya kemitraan antar lembaga pemerintahan kabupaten daerah tertinggal	persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan kemitraan antar lembaga daerah tertinggal	20%	100%	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	KPDT	77,0
g	Koordinasi pengelolaan masyarakat kawasan tertinggal	Terselenggaranya koordinasi pengelolaan masyarakat kawasan tertinggal	Jumlah rapat koordinasi wawasan kebangsaan Jumlah pemantauan dan evaluasi	12 4	12 4	Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Kemenko Polhukam	3,4

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
h	Pembinaan Administrasi Pendapatan dan Investasi Daerah	Meningkatnya kemampuan administrasi pendapatan dan investasi daerah	persentase kabupaten daerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi peningkatan kemampuan administrasi pendapatan dan investasi daerah	0%	50%	Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kemendagri	8,2
III	Peningkatan pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di Daerah Tertinggal	1.Peningkatan rata-rata Angka Harapan Hidup di daerah tertinggal 2.Berkurangnya Angka Kematian Bayi (AKB) di daerah tertinggal 3.Meningkatnya persentase Penolong Persalinan Terakhir oleh Tenaga Kesehatan	1. Rata-rata AHH di daerah tertinggal yang berada di bawah rata-rata nasional (Tahun) 2. AKB di daerah tertinggal (per 1000 kelahiran hidup) 3. Persentase Penolong Persalinan Terakhir oleh Tenaga Kesehatan (%)	67,5 25,2 74,7	68,6 22,8 100			132,0
a	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur kesehatan daerah tertinggal	Meningkatnya koordinasi pembangunan infrastruktur kesehatan daerah tertinggal	Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi pembangunan infrastruktur kesehatan daerah tertinggal	20%	100%	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	KPDT	70,0

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
b	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Kesehatan Dasar, Lanjutan Daerah Tertinggal	Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang Kesehatan Dasar Daerah Tertinggal	Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang Kesehatan Dasar Daerah Tertinggal	20%	100%	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	KPDT	62,0
IV	Peningkatan pelayanan pendidikan di Daerah Tertinggal	1. Meningkatnya rata-rata angka melek huruf usia 15-24 tahun di kabupaten daerah tertinggal 2. Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk di daerah tertinggal 3. Meningkatnya rata-rata APS usia 7-12 tahun di kabupaten daerah tertinggal 4. Meningkatnya rata-rata APS usia 13-15 tahun di kabupaten daerah tertinggal (berada di bawah rata-rata nasional)	1. Angka Melek Huruf usia 15- 24 tahun di kabupaten daerah tertinggal (%) 2. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun di kabupaten daerah tertinggal (Tahun) 3. Rata-rata APS usia 7-12 tahun di kabupaten daerah tertinggal (%) 4. Rata-rata APS usia 13-15 tahun di kabupaten daerah tertinggal (%)	97,8 7,3 97,0 89,6	99,6 7,7 99,4 97,9			183,0

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
a	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur pendidikan daerah tertinggal	Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur pendidikan daerah tertinggal	Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur pendidikan daerah tertinggal	20%	100%	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	KPDT	48,0
b	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Pendidikan Dasar, Menengah Dan Kejuruan di Daerah Tertinggal	Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan Pendidikan Dasar, Menengah Dan Kejuruan Daerah Tertinggal	Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan Pendidikan Dasar, Menengah Dan Kejuruan Daerah Tertinggal	20%	100%	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	KPDT	48,0
c	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Pendidikan Luar Sekolah Daerah Tertinggal	Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang Pendidikan Luar Sekolah Daerah Tertinggal	Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang Pendidikan Luar Sekolah Daerah Tertinggal	20%	100%	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	KPDT	87,0

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
V	Peningkatan sarana dan prasarana daerah tertinggal serta aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan	Meningkatnya persentase daerah tertinggal yang telah tersedia sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi Meningkatnya nilai dan volume perdagangan di daerah tertinggal	Indeks infrastruktur nilai dan volume perdagangan di daerah tertinggal					682,5
a	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur ekonomi daerah tertinggal	Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur ekonomi daerah tertinggal	Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur ekonomi daerah tertinggal	20%	100%	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	KPDT	170,0

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
b	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur energi daerah tertinggal	<p>1. Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur energi daerah tertinggal</p> <p>2. Meningkatnya Pemanfaatan Energi Matahari untuk Pengembangan Infrastruktur Dasar di Wilayah Perdesaan Tertinggal Terpencil</p>	<p>1. Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur energi daerah tertinggal</p> <p>2. Persentase kabupetan didaerah tertinggal yang memiliki database permintaan kelistrikan dengan menggunakan teknologi GIS dan memanfaatkan energi matahari untuk pengembangan infrastruktur serta peningkatan kemampuan masyarakat yang dapat melakukan pemetaan Wilayah Rentan Perubahan Iklim dan Kegiatan Adaptasi Untuk Mengantisipasi Perubahan Iklim</p>	20%	100%	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	KPDT	220,5

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
c	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi daerah tertinggal	Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi daerah tertinggal	Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi daerah tertinggal	20%	100%	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	KPDT	60,0
d	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi Daerah Tertinggal	Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur transportasi daerah tertinggal	Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur pendidikan daerah tertinggal	20%	100%	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	KPDT	232,0
TOTAL								3.894,8

BIDANG PEMBANGUNAN : WILAYAH DAN TATA RUANG
PRIORITAS BIDANG : Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi	Meningkatnya kapasitas aparaturn pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi	Terlaksananya peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi					782,6
a	Pencegahan dan pengurangan risiko bencana	1. Tersusunnya dokumen rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana 2. Terlaksananya dukungan pembentukan kelembagaan penanggulangan bencana daerah	1. Jumlah rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana yang tersusun (Provinsi & kab/Kota) 2. Terbentuknya kelembagaan penanggulangan bencana daerah (Provinsi & kab/Kota)	23 & 48	33 (s/d 2011) & 275	Penanggulangan bencana	BNPB	74,3
b.	Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana	Meningkatnya kapasitas aparaturn dan terlaksananya pembinaan kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana di daerah	Terlaksananya pelatihan dan pembinaan aparaturn dan masyarakat dalam penanggulangan bencana di daerah (Provinsi & kab/Kota)	23 & 48	33 (s/d 2011) & 275	Penanggulangan bencana	BNPB	34,5
c	Penyiapan peralatan dan logistik dikawasan rawan bencana	1. Pemenuhan kebutuhan logistik kebencanaan	1. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan logistik kebencanaan (Provinsi & kab/Kota)	16 & 0	17 (s/d 2012) & 77	Penanggulangan bencana	BNPB	230,2

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi	Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi					782,6
a	Pencegahan dan pengurangan risiko bencana	1. Tersusunnya dokumen rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana	1. Jumlah rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana yang tersusun (Provinsi & kab/Kota)	23 & 48	33 (s/d 2011) & 275	Penanggulangan bencana	BNPB	74,3
		2. Pendistribusian logistik kebencanaan pada daerah bencana	2. Terlaksananya pendistribusian logistik kebencanaan pada daerah bencana (Provinsi & kab/Kota)					
		1. Pemenuhan kebutuhan peralatan kebencanaan	1. Terlaksananya Pemenuhan kebutuhan peralatan kebencanaan	16 & 0	17 (s/d 2012) & 77	Penanggulangan bencana	BNPB	157,8
		2. Pendistribusian peralatan kebencanaan pada daerah bencana	2. Terlaksananya pendistribusian peralatan kebencanaan pada daerah bencana					
d	Pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk pengurangan risiko dan mitigasi bencana alam	1. Tersedianya data spasial kebencanaan	1. Tersedianya data spasial kebencanaan	5	33 ^{*)}	Penanggulangan bencana	BNPB	74,2
		2. Tersedianya sistem informasi penanggulangan bencana	2. Tersedianya sistem informasi penanggulangan bencana					

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Peningkatan kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi	Meningkatnya kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi	Terlaksananya peningkatan kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi					782,6
a	Pencegahan dan pengurangan risiko bencana	1. Tersusunnya dokumen rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana	1. Jumlah rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana yang tersusun (Provinsi & kab/Kota)	23 & 48	33 (s/d 2011) & 275	Penanggulangan bencana	BNPB	74,3
e	Pengembangan Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Meningkatnya sarpras Pemerintahan Pasca Bencana/pengurangan resiko bencana	Prosentase sarpras yang diberikan kepada daerah	40%	75%	Penguatan penyelenggaraan pemerintahan umum	Kemendagri	211,7
		Meningkatnya kapasitas aparat dalam upaya penanggulangan bencana daerah dan bahaya kebakaran	Prosentase fasilitasi peningkatan kapasitas aparat dalam upaya penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran	75%	75%	Penguatan penyelenggaraan pemerintahan umum	Kemendagri	
II	Pelaksanaan tanggap darurat dan penanganan korban bencana alam dan kerusuhan sosial yang terkoordinasi, efektif dan terpadu (Pembentukan tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan alat transportasi yang memadai dengan basis 2 lokasi strategis (Jakarta-Malang) yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia)	Penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang cepat efektif dan terpadu (Terbentuknya tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan alat transportasi yang memadai dengan basis 2 lokasi strategis (Jakarta-Malang) yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia)	Terlaksananya penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang cepat efektif dan terpadu (Terbentuknya tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan alat transportasi yang memadai dengan basis 2 lokasi strategis (Jakarta-Malang) yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia)					12,9
a	Penanganan pengungsi akibat bencana	Penanganan pengungsi akibat bencana secara efektif dan terpadu	Terlaksananya penanganan pengungsi akibat bencana secara efektif dan terpadu	55	175	Penanggulangan bencana	BNPB	12,9

NO	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi	Meningkatnya kapasitas aparaturn pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi	Terlaksananya peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi					782,6
a	Pencegahan dan pengurangan risiko bencana	1. Tersusunnya dokumen rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana	1. Jumlah rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana yang tersusun (Provinsi & kab/Kota)	23 & 48	33 (s/d 2011) & 275	Penanggulangan bencana	BNPB	74,3
III	Rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca bencana Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatera Barat dan wilayah pasca bencana lainnya	Terehabilitasi dan terekonstruksinya wilayah pasca bencana Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatera Barat dan wilayah pasca bencana lainnya	Terlaksananya percepatan pemulihan di wilayah pasca bencana Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatera Barat dan wilayah pasca bencana lainnya					32,6
a	Rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana	Koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana (Jawa Barat, Sumatera Barat dan Wilayah Pasca Bencana lainnya)	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana (Jawa Barat, Sumatera Barat dan Wilayah Pasca Bencana lainnya)	15	30	Penanggulangan bencana	BNPB	13,4
b	Rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pasca bencana	Koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana sosial ekonomi di wilayah pasca bencana (Jawa Barat, Sumatera Barat dan Wilayah Pasca Bencana lainnya)	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana sosial ekonomi di wilayah pasca bencana (Jawa Barat, Sumatera Barat dan Wilayah Pasca Bencana lainnya)	15	30	Penanggulangan bencana	BNPB	19,2
TOTAL								828,1

Keterangan :

^{K)} Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG

: WILAYAH DAN TATA RUANG

: Pemantapan Desentralisasi, Peningkatan Kualitas Hubungan Pusat Daerah dan Antardaerah

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Penataan Pembagian Urusan Pemerintahan antar Tingkat Pemerintahan							62,9
a.	Penataan Urusan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya penguatan dan pemantapan urusan pemerintahan daerah pada aspek pelaksanaan dan pengembangan urusan pemerintahan daerah, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan.	Jumlah kebijakan penyempurnaan pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan dalam revisi UU No. 32 Tahun 2004.	1 Kebijakan	1 Kebijakan ^{K)}	PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH	Kemendagri	62,9
		Jumlah peraturan pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai turunan dari revisi UU No. 32 Tahun 2004.		1 Peraturan Pemerintah ^{K)}				
		Jumlah sosialisasi penyempurnaan pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan kepada K/L dan Pemerintah Daerah.		1 Paket ^{K)}				
		Persentase pelaksanaan urusan yang telah menjadi kewenangan pemerintahan daerah	-	100%				

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Penataan Pembagian Urusan Pemerintahan antar Tingkat Pemerintahan							62,9
a.	Penataan Urusan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya penguatan dan pemantapan urusan pemerintahan daerah pada aspek pelaksanaan dan pengembangan urusan pemerintahan daerah serta evaluasi dan pelaporan	Jumlah kebijakan penyempurnaan pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan dalam revisi UU No. 32 Tahun 2004. Persentase daerah yang sudah menyelesaikan perda mengenai kewenangan/urusan (wajib dan pilihan) pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. Persentase perda kewenangan/urusan pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota yang telah dievaluasi. Jumlah bidang urusan yang telah disusun Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) oleh K/L dan fasilitasi implementasi	1 Kebijakan 30% 30% 5 bidang urusan	1 Kebijakan ^{K)} 100% 100% 31 bidang urusan	PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH	Kemendagri	62,9
		Terwujudnya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan peraturan perundang-undangan desentralisasi dan otonomi daerah, baik di Pusat maupun antara Pusat dan Daerah dalam rangka reformasi regulasi secara bertahap.	Persentase peraturan perundang-undangan sektoral yang diinventarisasi yang belum sejalan dengan peraturan perundang-undangan desentralisasi dan otonomi daerah di pusat dan di daerah	100%	100%			

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Penataan Pembagian Urusan Pemerintahan antar Tingkat Pemerintahan							62,9
a.	Penataan Urusan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya penguatan dan pemantapan urusan pemerintahan daerah pada aspek pelaksanaan dan pengembangan urusan pemerintahan daerah serta evaluasi dan pelaporan	Jumlah kebijakan penyempurnaan pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan dalam revisi UU No. 32 Tahun 2004. Persentase harmonisasi peraturan perundang-undangan sektoral dengan peraturan perundang-undangan desentralisasi dan otonomi daerah di pusat	1 Kebijakan 20%	1 Kebijakan ^{K)} 60%	PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH	Kemendagri	62,9
II	Penataan Daerah							45,0
a.	Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus	Terbitnya UU Keistimewaan DIY Tersusunnya dan terimplementasinya peraturan pelaksana seluruh UU yang mengatur otonomi khusus Terevaluasinya perkembangan Daerah Otonom Baru	Jumlah undang-undang Jumlah peraturan pelaksana turunan UU yang mengatur daerah dengan otonomi khusus Persentase daerah otonom baru (< 3 th) yang dievaluasi	1 UU 3 RPP dan 2 Perpres 100%	1 UU ^{K)} 3 RPP dan 2 Perpres ^{K)} 100%	PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH	Kemendagri	25,0

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Penataan Pembagian Urusan Pemerintahan antar Tingkat Pemerintahan							62,9
a.	Penataan Urusan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya penguatan dan pemantapan urusan pemerintahan daerah pada aspek pelaksanaan dan pengembangan urusan pemerintahan	Jumlah kebijakan penyempurnaan pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan dalam revisi UU No. 32 Tahun 2004.	1 Kebijakan	1 Kebijakan ^{K)}	PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH	Kemendagri	62,9
b.	Penghentian/pembatasan pemekaran wilayah	Terlaksananya seluruh mekanisme pengusulan pemekaran dan penggabungan daerah sesuai dengan PP No. 78 Tahun 2007, dalam rangka penghentian/pembatasan pemekaran wilayah/pembentukan daerah otonom baru.	Jumlah Strategi Dasar Penataan Daerah Persentase evaluasi setiap usulan pemekaran, penggabungan, dan penghapusan daerah sesuai dengan PP. No 78 Tahun 2007 Jumlah daerah otonom baru yang terbentuk berdasarkan usulan Pemerintah	1 paket - -	1 paket ^{K)} 100% 0 (nol)	PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH	Kemendagri	20,0
III	Peningkatan Kerjasama Daerah							141,4
a.	Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah	Meningkatnya daerah yang menerima manfaat dari kerja sama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik	Persentase peningkatan jumlah daerah yang melaksanakan kerja sama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik. Persentase jumlah daerah yang menerima manfaat dari kerja sama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik. Jumlah sistem database dan sistem monev kerja sama daerah yang disusun	10% 50% -	20% dari jumlah di tahun 2013 75% 1 paket ^{K)}	PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Kemendagri	141,4

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Penataan Pembagian Urusan Pemerintahan antar Tingkat Pemerintahan							62,9
a.	Penataan Urusan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya penguatan dan pemantapan urusan pemerintahan daerah pada aspek pelaksanaan dan pengembangan urusan pemerintahan daerah serta evaluasi dan pelaporan	Jumlah kebijakan penyempurnaan pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan dalam revisi UU No. 32 Tahun 2004. Jumlah pemetaan pelaksanaan kerja sama daerah baik yang sukses maupun yang gagal Jumlah pemuktahiran pemetaan tentang pelaksanaan kerja sama daerah baik yang sukses maupun yang gagal	1 Kebijakan	1 Kebijakan ^{K)} 1 paket ^{K)} 2 paket ^{K)}	PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH	Kemendagri	62,9
		Meningkatnya kerjasama antar daerah	Persentase jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar daerah yang diusulkan	75%	75%			
		Tersusunnya regulasi Pusat tentang administrasi pelayanan terpadu di tingkat kecamatan	Jumlah permendagri tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.	1 Permendagri	1 Permendagri ^{K)}			
		Terlaksananya administrasi pelayanan terpadu di tingkat kecamatan.	Persentase kabupaten/kota yang telah melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan	10% kabupaten/kota	50% kabupaten/kota			
IV	Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah							82,5

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Penataan Pembagian Urusan Pemerintahan antar Tingkat Pemerintahan							62,9
a.	Penataan Urusan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya penguatan dan pemantapan urusan pemerintahan daerah pada aspek pelaksanaan dan pengembangan urusan pemerintahan daerah, serta evaluasi dan pelaksanaan	Jumlah kebijakan penyempurnaan pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan dalam revisi UU No. 32 Tahun 2004.	1 Kebijakan	1 Kebijakan ^{K)}	PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH	Kemendagri	62,9
a.	Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah	Terevaluasinya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase daerah yang dievaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan	100%	100%	PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH	Kemendagri	60,5
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai tindak lanjut dari pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah	Persentase daerah yang meningkat kinerja pemerintahan daerahnya dalam penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah	60%	90%			
b.	Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen	Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan.	Jumlah perda yang dikaji	3.000 perda	20.000 perda ^{K)}	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Kemendagri	12,5

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Penataan Pembagian Urusan Pemerintahan antar Tingkat Pemerintahan							62,9
a.	Penataan Urusan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya penguatan dan pemantapan urusan pemerintahan daerah pada aspek pelaksanaan dan pengembangan urusan pemerintahan	Jumlah kebijakan penyempurnaan pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan dalam revisi UU No. 32 Tahun 2004.	1 Kebijakan	1 Kebijakan ^{K)}	PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH	Kemendagri	62,9
c.	Penyusunan Peraturan Perundangan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya dukungan pelayanan teknis dan administrasi berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	Jumlah penetapan UU tentang pemerintahan daerah sebagai revisi UU No. 32 Tahun 2004	1 UU	1 UU ^{K)}	PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH	Kemendagri	9,5
			Persentase penyelesaian penyusunan peraturan pelaksanaan UU hasil revisi UU No. 32 Tahun 2004		100%			
			Jumlah sosialisasi peraturan bidang otonomi daerah	1 paket	5 paket ^{K)}			
TOTAL								331,8

Keterangan :

^{K)} Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS BIDANG

: WILAYAH DAN TATA RUANG
: Perbaikan Tata Kelola dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD							44,7
a.	Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan, dan Pelaporan Kinerja	Tersusunnya peraturan pemerintah pengganti PP No. 41 Tahun 2007 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya agar organisasi perangkat daerah dapat efektif dan efisien dalam melaksanakan seluruh SPM yang telah ditetapkan serta mengharmoniskan dengan amanat perundang-undangan sektor dalam pembentukan organisasi sektor di daerah.	Jumlah evaluasi pelaksanaan PP No. 41 Tahun 2007	1 paket	1 paket	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Kemendagri	6,0
		Jumlah pengesahan PP pengganti PP No. 41 Tahun 2007			1 PP ^{K)}			
		Persentase daerah yang melaksanakan PP pengganti PP No. 41 Tahun 2007			100%			
		Jumlah laporan monitoring pelaksanaan PP pengganti PP No. 41 Tahun 2007			2 laporan ^{K)}			
		Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan PP pengganti PP No. 41 Tahun 2007			1 laporan ^{K)}			
b.	Penerapan Indikator Utama Pelayanan Publik di Daerah	Meningkatnya Implementasi Urusan Pemerintahan Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah.	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diterapkan oleh Daerah	5 SPM	17 SPM	PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH	Kemendagri	20,0
		Jumlah bidang SPM yang dimonitor penerapannya		-	17 bidang SPM ^{K)}			

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD							44,7
a.	Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan, dan Pelaporan Kinerja	Tersusunnya peraturan pemerintah pengganti PP No. 41 Tahun 2007 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya agar organisasi perangkat daerah dapat efektif dan efisien dalam melaksanakan seluruh SPM yang telah ditetapkan serta	Jumlah evaluasi pelaksanaan PP No. 41 Tahun 2007	1 paket	1 paket	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Kemendagri	6,0
		Jumlah bidang SPM yang dievaluasi penerapannya	-	17 bidang SPM ^{K)}				
c.	Pembinaan administrasi pejabat negara di daerah dan DPRD	Kapasitas kepala daerah dan pimpinan DPRD yang memadai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah kepala daerah dan pimpinan DPRD yang mengikuti kegiatan orientasi bagi peningkatan kemampuan dalam menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan daerah, legislasi, penganggaran, dan pengawasan, serta inovasi pemerintahan dan pembangunan.	Kepala daerah 5 kabupaten/kota terpilih di setiap provinsi pada 33 provinsi.	Kepala daerah di ^{K)} 478 kabupaten/kota otonom.	PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH	Kemendagri	18,7
			Pimpinan DPRD 5 kabupaten/ kota terpilih di setiap provinsi pada 33 provinsi.	Pimpinan DPRD ^{K)} di 491 kabupaten/kota otonom				
			Kepala daerah provinsi pada 33 provinsi.	Kepala daerah ^{K)} provinsi pada 33 provinsi.				

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD							44,7
a.	Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan, dan Pelaporan Kinerja	Tersusunnya peraturan pemerintah pengganti PP No. 41 Tahun 2007 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya agar organisasi perangkat daerah dapat efektif dan efisien dalam melaksanakan seluruh SPM yang telah ditetapkan serta	Jumlah evaluasi pelaksanaan PP No. 41 Tahun 2007	1 paket	1 paket	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Kemendagri	6,0
			Pimpinan DPRD provinsi pada 33 provinsi.	Kepala daerah dan pimpinan DPRD provinsi pada 33 provinsi.				
		Jumlah laporan evaluasi terhadap peningkatan kapasitas kepala daerah dan DPRD		1 paket ^{K)}				
		Meningkatnya kualitas Perda yang berasal dari usul inisiatif DPRD	Jumlah perwakilan dari masing-masing komisi DPRD yang mengikuti diklat <i>Regulatory Impact Assesment</i> (RIA) atau harmonisasi peraturan perundangan.	Perwakilan dari masing-masing komisi DPRD di 5 kabupaten/kota terpilih di setiap provinsi pada 33 provinsi.	Perwakilan dari masing-masing komisi DPRD di 491 Kab/Kota ^{K)}			
			Jumlah laporan evaluasi kualitas Perda yang berasal dari usul inisiatif DPRD		1 paket ^{K)}			

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD							44,7
a.	Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan, dan Pelaporan Kinerja	Tersusunnya peraturan pemerintah pengganti PP No. 41 Tahun 2007 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya agar organisasi perangkat daerah dapat efektif dan efisien dalam melaksanakan seluruh SPM yang telah ditetapkan serta	Jumlah evaluasi pelaksanaan PP No. 41 Tahun 2007	1 paket	1 paket	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Kemendagri	6,0
II	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD							42,3
a.	Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pemerintahan dan Politik	Terintegrasinya seluruh diklat bagi PNS Daerah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, politik dan penerapan SPM di daerah	Jumlah Grand Strategy penyelenggaraan diklat	1	1 ^{K)}	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN	Kemendagri	42,3
			Jumlah sosialisasi Grand Strategy penyelenggaraan diklat		1 paket ^{K)}			
			Jumlah daerah pelaksana Grand Strategy penyelenggaraan diklat		33 provinsi			
			Jumlah camat peserta diklat teknis pemerintahan	150	510 ^{K)}			
			Jumlah provinsi/angkatan diklat penguatan pemerintahan dan politik bagi anggota DPRD, pejabat pemerintahan Provinsi dan Kabupaten dan Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, politik dan SPM		33 Provinsi (52 Angkatan) ^{K)}			
			Jumlah peserta orientasi pengenalan tugas bagi anggota DPRD hasil Pemilu 2014		3.000 ^{K)}			
			Jumlah angkatan diklat calon camat		3 ^{K)}			

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD							44,7
a.	Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan, dan Pelaporan Kinerja	Tersusunnya peraturan pemerintah pengganti PP No. 41 Tahun 2007 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya agar organisasi perangkat daerah dapat efektif dan efisien dalam melaksanakan seluruh SPM yang telah ditetapkan serta	Jumlah evaluasi pelaksanaan PP No. 41 Tahun 2007	1 paket	1 paket	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Kemendagri	6,0
III	Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah							96,2
a.	Pembinaan dan Fasilitasi Dana Perimbangan	Peningkatan efektifitas pemanfaatan DAK sesuai Petunjuk Pelaksanaan	Persentase provinsi, kab/kota yang telah memanfaatkan DAK sesuai Petunjuk Pelaksanaan	70%	90%	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	Kemendagri	15,1
		Optimalisasi penyerapan DAK oleh daerah	Persentase daerah yang telah Optimal (100%) menyerap DAK	70%	90%			
		Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan	Jumlah rekomendasi kebijakan untuk dukungan materi sebagai masukan terhadap revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.	1 paket rekomendasi kebijakan	1 paket rekomendasi kebijakan ^{KJ}			
		Tersusunnya kebijakan/regulasi di bidang fasilitasi dana perimbangan yang dapat diimplementasikan di daerah	Jumlah Permendagri	6	18 ^{KJ}			
			Jumlah Surat Edaran Mendagri	2 SE	6 SE ^{KJ}			

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD							44,7
a.	Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan, dan Pelaporan Kinerja	Tersusunnya peraturan pemerintah pengganti PP No. 41 Tahun 2007 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya agar organisasi perangkat daerah dapat efektif dan efisien dalam melaksanakan seluruh SPM yang telah ditetapkan serta	Jumlah evaluasi pelaksanaan PP No. 41 Tahun 2007	1 paket	1 paket	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Kemendagri	6,0
b.	Pembinaan Administrasi Anggaran Daerah	Peningkatan kualitas belanja daerah dalam APBD	Persentase kab/kota yang proporsi belanja langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung	30%	60%	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	Kemendagri	37,6
			Persentase rata-rata belanja modal terhadap total belanja daerah (Propinsi)	26%	30%			
			Penetapan APBD secara tepat waktu	60%	90%			
c.	Pembinaan Administrasi Pendapatan dan Investasi Daerah	Meningkatnya pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah	Persentase rata-rata perolehan pajak dan retribusi daerah terhadap APBD Kab/Kota daerah	4,60%	11,80%	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	Kemendagri	22,5
			Persentase rata-rata perolehan pajak dan retribusi daerah terhadap APBD Provinsi	44,50%	48%			
		Meningkatnya Optimalisasi investasi daerah dan pengelolaan barang milik daerah	Persentase rata-rata hasil penerimaan investasi dan barang milik daerah terhadap PAD	3%	7%			
d.	Pembinaan dan Fasilitasi Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah	Provinsi dan kabupaten/ kota memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	Persentase daerah provinsi, kab/kota ber-LKPD dengan status WTP.	15%	100%	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	Kemendagri	21,0

NO	FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (hasil outcomes/output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT	TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)
				2010	2014			
I	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD							44,7
a.	Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan, dan Pelaporan Kinerja	Tersusunnya peraturan pemerintah pengganti PP No. 41 Tahun 2007 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya agar organisasi perangkat daerah dapat efektif dan efisien dalam melaksanakan seluruh SPM yang telah ditetapkan serta	Jumlah evaluasi pelaksanaan PP No. 41 Tahun 2007	1 paket	1 paket	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DEPARTEMEN DALAM NEGERI	Kemendagri	6,0
		Penetapan dan penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu	Persentase penetapan dan penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu.	40%	90%			
TOTAL								183,3

Keterangan :

^{K)} Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)